
SEKOLAH NEGARAWAN
NEGARA
SALAH
DESAIN
Prayogi R. Saputra, S.IP., M.M., Ph.D
Rinto Setiyawan, A.Md.T., S.H., CTP

SEKOLAH
NEGARAWAN
X
SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

KATA PENGANTAR

Buku ini tidak lahir dari kemarahan. Ia juga tidak ditulis dari posisi merasa paling benar. Ia lahir dari satu kegelisahan sederhana yang mungkin juga dirasakan banyak orang yaitu **mengapa negara yang kita cintai terasa semakin sulit memberikan rasa aman, adil, dan menenteramkan bagi rakyatnya sendiri?**

Sebagai warga negara, kami tumbuh dengan keyakinan bahwa Indonesia dibangun di atas nilai-nilai luhur. Kami percaya pada Pancasila. Kami percaya pada tujuan bernegara sebagaimana tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar.

Namun, seiring waktu, jarak antara nilai dan kenyataan itu terasa semakin lebar. Keadilan sering terdengar indah dalam pidato, tetapi terasa jauh dalam kehidupan sehari-hari. Negara tampak hadir di banyak ruang, namun sering absen ketika rakyat benar-benar membutuhkan perlindungan.

Kegelisahan itu tidak langsung menjelma menjadi kesimpulan. Ia justru mengendap lama dalam percakapan, dalam pengamatan, dan dalam pertanyaan-pertanyaan yang sulit dijawab jika hanya melihat masalah sebagai kesalahan individu. Dari sanalah buku ini mulai ditulis.

Buku ini tidak dimaksudkan untuk menyalahkan siapa pun secara personal. Ia juga tidak ditujukan untuk merendahkan niat baik siapa pun. Sebaliknya, buku ini berangkat dari satu asumsi yang sederhana, bahwa banyak orang di negeri ini bekerja dengan niat baik,

namun ditempatkan dalam **desain negara yang tidak sehat.**

Jika hasilnya terus melukai rakyat, maka kejujuran menuntut kita untuk tidak berhenti pada siapa yang menjalankan sistem, melainkan berani memeriksa **bagaimana sistem itu dirancang.**

Kami menulis buku ini sebagai warga negara, bukan sebagai ahli yang berdiri di luar masalah. Kami juga bagian dari rumah yang sama. Merasakan kebocoran yang sama. Dan, seperti banyak orang lain, pernah memilih menambal ketimbang bertanya lebih jauh.

Buku ini adalah hasil dari keberanian untuk berhenti sejenak dan mengatakan pada diri sendiri yaitu *barangkali yang perlu diperiksa bukan hanya perilaku, melainkan desainnya.*

Di dalam buku ini, pembaca tidak akan menemukan ajakan untuk kemarahan massal atau solusi instan yang terdengar heroik. Yang ditawarkan hanyalah satu hal yang lebih sunyi, namun lebih menentukan cara berpikir struktural tentang negara dan posisi rakyat di dalamnya.

Jika setelah membaca buku ini pembaca merasa tidak sepenuhnya nyaman, itu bukan tujuan yang ingin kami capai. Namun kami percaya, ketidaknyamanan secamam itu sering kali menandai awal dari kesadaran yang jujur. Buku ini tidak meminta pembaca untuk setuju. Ia hanya mengajak pembaca untuk berani mempertanyakan apakah negara ini masih bekerja sebagaimana tujuan awal pendiriannya.

Akhir kata, buku ini dipersembahkan bukan untuk mereka yang ingin merasa paling benar, melainkan untuk mereka yang masih peduli dan bersedia berpikir lebih dalam tentang rumah bersama bernama Indonesia.

Semoga buku ini menjadi ruang dialog, bukan palu penghakiman. Menjadi undangan berpikir, bukan tuntutan emosi. Karena hanya dengan kejernihan dan keberanian intelektual, kita bisa berharap bangunan besar bernama negara kembali menjadi rumah yang layak bagi seluruh rakyatnya.

Jakarta, Februari 2026

Tim Penulis

PROLOG

Rumah yang Kita Huni Bersama

Tidak semua kerusakan terdengar keras.
Sebagian justru hadir dengan sangat sunyi.

Ia tidak roboh seketika.
Tidak runtuh di depan mata.
Ia hanya bocor sedikit demi sedikit,
cukup kecil untuk diabaikan,
cukup lama untuk menjadi kebiasaan.

Kita hidup di dalam bangunan bernama Indonesia.
Bangunan ini tampak kokoh dari luar.
Angkanya rapi, pidatonya meyakinkan,
dan lambang-lambangnya berdiri tegak di setiap sudut.

Namun di dalamnya, banyak dari kita merasakan hal yang sama, yaitu :
keadilan terasa jauh,
perlindungan terasa bersyarat,
dan kesejahteraan seperti selalu tertunda.

Anehnya, kondisi ini jarang disebut sebagai kegagalan.
Ia lebih sering disebut sebagai tantangan.
Atau, dalam bahasa yang lebih halus,
sebagai sesuatu yang “masih dalam proses”.

Padahal, jika kita jujur pada pengalaman hidup sehari-hari,

kita tahu bahwa yang kita rasakan bukan sekadar proses yang lambat.
Ada sesuatu yang tidak bekerja sebagaimana mestinya.

Kebocoran yang Dianggap Biasa

Kita mulai terbiasa dengan banyak hal.

Terbiasa dengan pelayanan yang rumit.
Terbiasa dengan aturan yang berubah-ubah.
Terbiasa dengan hukum yang terasa tajam ke bawah dan tumpul ke atas.
Terbiasa dengan negara yang lebih cepat menagih daripada melindungi.

Pada titik tertentu, kebiasaan ini tidak lagi terasa sebagai masalah.
Ia menjelma menjadi normalitas baru.

Ketika ada kebocoran, kita menutupnya sendiri.
Ketika ada kerusakan, kita bergotong royong.
Ketika ada yang tertindas, kita menggalang bantuan.

Semua itu tampak baik.
Bahkan mulia.

Namun, jarang sekali kita berhenti dan bertanya:
Mengapa kebocoran ini selalu kembali?
Mengapa kerusakan ini tidak pernah benar-benar selesai?

Pertanyaan itu sering terasa tidak nyaman.
Terlalu besar.
Terlalu politis.
Terlalu “tinggi”.

Maka kita memilih yang lebih aman:
menjadi warga yang baik,
menjadi rakyat yang sabar,
menjadi penolong yang rajin.

Ketika Kebaikan Menjadi Rutinitas Sistemik

Tidak ada yang salah dengan kebaikan.
Yang bermasalah adalah ketika kebaikan
dipaksa menggantikan tanggung jawab sistem.

Di sinilah sebuah pembalikan peran terjadi secara perlahan.

Yang seharusnya menjadi tugas aparatur negara,
pelan-pelan dialihkan menjadi beban moral rakyat.
Yang seharusnya diperbaiki secara struktural,
diselesaikan dengan pengorbanan individual.

Kita diminta terus memahami.
Terus berkorban.
Terus bersabar.

Dan anehnya, semakin kita melakukannya,
semakin sedikit pertanyaan yang diajukan

kepada mereka yang memang diberi mandat untuk mengurus negara.

Rumah, Pemilik, dan Pekerja

Bayangkan sebuah rumah bersama.

Rumah itu dibangun dengan tujuan melindungi seluruh penghuninya.
Pemilik rumah membayar pekerja untuk merawatnya,
memastikan atapnya tidak bocor,
dan fondasinya tetap kokoh.

Suatu hari, air mulai menetes dari langit-langit.
Awalnya kecil.
Lalu bertambah.

Para penghuni mulai sibuk menampung air.
Sebagian membersihkan lantai.
Sebagian memperbaiki seadanya.

Ketika ada yang bertanya kepada pekerja rumah,
jawabannya sederhana:
“Rumah ini kokoh. Tidak ada masalah serius.”

Lama-kelamaan, para penghuni berhenti bertanya.
Mereka menjadi sangat sibuk menambal.
Bahkan mulai bangga pada ketangguhan mereka sendiri.

Padahal, yang tidak pernah dibicarakan adalah satu hal mendasar:
apakah rumah ini sejak awal dirancang dengan benar?

Tentang Desain dan Tanggung Jawab

Dalam dunia arsitektur, tidak semua kesalahan tampak di permukaan.
Sebagian justru tertanam dalam perencanaan.

Sebuah bangunan bisa terlihat indah,
namun tidak ramah bagi manusia.
Bisa berdiri lama,
namun terus melukai penghuninya.

Ketika itu terjadi,
arsitek yang jujur tidak akan menyalahkan penghuni.
Ia akan membuka kembali gambar rancangannya.
Mengecek filosofi, denah, dan detail teknisnya.

Negara seharusnya diperlakukan dengan logika yang sama.

Jika kerusakan terjadi di banyak sektor sekaligus,
hukum, ekonomi, birokrasi, perlindungan sosial,
maka sangat kecil kemungkinan penyebabnya adalah kebetulan.

Lebih masuk akal untuk mengatakan:
ada masalah pada desainnya.

Pertanyaan yang Terlalu Lama Ditunda

Buku ini tidak ditulis untuk menyalahkan siapa pun secara personal.
Ia tidak mencari kambing hitam.
Ia tidak mengajak kemarahan.

Buku ini mengajak pembaca melakukan sesuatu yang jauh lebih sunyi,
namun jauh lebih menentukan:
berani bertanya secara struktural.

Apakah negara ini benar-benar dirancang
untuk melindungi rakyatnya?
Ataukah kita hanya mewarisi desain
yang tidak pernah diperiksa ulang secara jujur?

Apakah kepedulian kita selama ini
membantu memperbaiki keadaan,
atau justru tanpa sadar
menjaga agar sistem yang rusak tetap berjalan?

Dan yang paling penting:
sebagai pemilik kedaulatan,
apakah kita masih berada di posisi pemilik,
atau telah lama diposisikan sebagai penanggung akibat?

Mengapa Buku Ini Ditulis

Buku ini tidak menjanjikan solusi instan.
Ia tidak menawarkan jalan pintas.

Ia juga tidak menjual harapan palsu.

Yang ditawarkan di sini hanyalah satu hal:
kejelasan posisi.

Kejelasan tentang siapa kita dalam negara.
Kejelasan tentang apa yang seharusnya menjadi tugas rakyat,
dan apa yang tidak boleh terus-menerus dibebankan kepada mereka.

Karena sebuah rumah bersama
tidak akan pernah menjadi tempat yang aman
selama pemiliknya terus disibukkan
dengan menambal kebocoran,
tanpa pernah diberi ruang
untuk memeriksa desainnya.

Sebelum Kita Melangkah Lebih Jauh

Sebelum berbicara tentang konstitusi,
sebelum menyebut struktur kekuasaan,
sebelum membahas perubahan apa pun,
kita perlu menyepakati satu hal sederhana:

Kerusakan yang berulang
bukan sekadar nasib.
Ia sering kali adalah tanda
bahwa ada yang keliru sejak awal.

Jika Anda membaca buku ini sampai di titik ini

dan merasa sedikit tidak nyaman,
itu wajar.

Ketidaknyamanan itu bukan tanda penolakan.
Ia sering kali adalah tanda
bahwa kita sedang mendekati kebenaran
yang terlalu lama dihindari.

Mari kita lanjutkan.
Bukan dengan kemarahan.
Bukan dengan prasangka.

Melainkan dengan satu keberanian dasar:
berani melihat rumah kita apa adanya,
dan bertanya apakah ia memang dirancang
untuk manusia yang menghuninya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... I
PROLOG..... IV
DAFTAR ISI..... XII
DAFTAR GAMBAR XVIII
BAB I. BANGUNAN YANG TAMPAK MEGAH, TAPI BOCOR.....1

- Negara yang Terlihat Kuat 2
- Kebocoran yang Berulang 3
- Mengapa Kerusakan Sulit Ditunjuk.....4
- Negara sebagai Rumah Bersama.....5
- Kebiasaan yang Membuat Kita Diam 6
- Premis Dasar Buku Ini 7
- Menggeser Cara Pandang.....8

BAB II. KEPEDULIAN YANG SALAH ARAH.....10

- Rakyat yang Rajin Menambal 10
- Gotong Royong yang Dipuji, Tapi Dimanfaatkan 11
- Ketika Kepedulian Menjadi Identitas.....12
- Normalisasi Kebocoran.....13
- Antara Niat dan Dampak 14
- Mengalihkan Beban Secara Halus 15
- Gelisah yang Diperlukan 16
- Kepedulian yang Diperlukan.....16
- Pertanyaan yang Muncul.....17

- Menuju Bab Berikutnya 17

BAB III. KETIKA PEMILIK RUMAH MENJADI TUKANG..... 19

- Negara dan Logika Kontrak..... 19
- Pajak dan Ilusi Kewajiban Satu Arah..... 21
- Mandat yang Disederhanakan..... 22
- Menanggung Akibat yang Bukan Dirancang Sendiri..... 22
- Normalisasi Penderitaan 23
- Peran yang Dipersempit 24
- Ini Tidak Adil 25
- Mengembalikan Posisi 25
- Menuju Pembahasan Desain..... 26

BAB IV. NEGARA YANG GAGAL MEMAHAMI KEDAULATAN RAKYAT 28

- Rakyat sebagai Objek Kebijakan..... 28
- Bahasa Negara dan Cara Negara Berbicara..... 29
- Populisme dan Simbolisme..... 30
- Negara yang Sibuk Mengatur..... 31
- Ketika Kritik Dianggap Gangguan 32
- Mengalihkan Kesalahan ke Sesama Rakyat..... 33
- Memahami Ulang Kedaulatan..... 34
- Marah yang Terarah 35

- Menuju Pembahasan Desain Konstitusional 35

BAB V. PANCASILA SEBAGAI FILOSOFI YANG DIKHIANATI.....37

- Pancasila sebagai Filosofi Arsitektur 37
- Nilai Kemanusiaan dan Praktik Kekuasaan.....39
- Pancasila yang Diucap, Tapi Tidak Diinstitusikan 40
- Antara Ideologi dan Desain 41
- Menghindari Sinisme 42
- Jurang yang Terasa 43
- Pancasila sebagai Standar Evaluasi.....43
- Kesedihan yang Bermartabat.....44
- Menuju Pembahasan Desain Teknis 45

BAB VI. KONSTITUSI SEBAGAI DESAIN TEKNIS KEKUASAAN.....46

- Konstitusi sebagai Gambar Kerja Kekuasaan.....46
- Pembagian Kewenangan yang Tidak Proporsional 47
- Pengawasan yang Lemah 48
- Mengapa Hukum Terasa Tidak Hadir.....49
- Relasi Antarlembaga yang Kabur.....50
- Sentralisasi yang Terselubung 50

- Desain yang Tidak Responsif 51
- Mengapa Kita Tidak Melihatnya Sejak Awal? 52
- Momen Kejelasan 52
- Menuju Perubahan Desain 53

BAB VII. ILUSI STABILITAS DAN KEBOHONGAN SISTEMIK 54

- Negara Mengklaim Baik-Baik Saja 54
- Statistik dan Realitas Hidup 55
- Narasi "Oknum" 56
- Krisis yang Dinormalisasi 57
- Stabilitas sebagai Perisai 58
- Membedakan Optimisme dan Penyangkalan 59
- Mengapa Kita Mudah Percaya 60
- Titik Balik Cara Pikir 60
- Menuju Pembahasan Lanjutan 61

BAB VIII. MENGAPA MENAMBAL TIDAK PERNAH CUKUP 62

- Logika Tambal Sulam 62
- Siklus Kerusakan yang Berulang 63
- Beban Psikologis yang Jarang Dibahas 64
- Negara yang Bergantung pada Pengorbanan 65

- Kelelahan Sosial sebagai Strategi Tak Tertulis 65
- Lelah yang Masuk Akal 66
- Mengapa Solusi Palsu Terasa Nyaman 67
- Siap untuk Perubahan Besar 68
- Menutup Siklus 68

BAB IX. MEMBENAHI DENAH: JALAN KONSTITUSIONAL 70

- Mengapa Perubahan Harus Dimulai dari Desain 70
- Amandemen sebagai Mekanisme Sah 71
- Mengembalikan Denah Kedaulatan 72
- MPR sebagai Penjelmaan Kedaulatan 73
- Pemerintah sebagai Pelaksana, Bukan Pemilik Kuasa 74
- Harapan yang Rasional 74
- Tidak Meruntuhkan, Tetapi Memperbaiki 75
- Jalan yang Sah dan Terbuka 76
- Penutup Bab 76

BAB X. DARI RAKYAT BAIK KE RAKYAT BERDAULAT 78

- Rakyat Baik 78
- Rakyat Berdaulat 79
- Keberanian Berpikir Struktural 80

- Peran Intelektual dan Masyarakat Sipil....80
- Meninggalkan Kepedulian Semu 81
- Berdiri Sejajar dengan Negara 82
- Martabat sebagai Penutup.....82
- Penutup Akhir.....84

EPILOG BERANI MENGUBAH GAMBAR BANGUNAN.....85

- Negara Bukan Takdir 85
- Konstitusi Bukan Kitab Suci.....87
- Kedaulatan Bukan Slogan 88
- Keberanian Memperbaiki Desain.....88
- Menutup dengan Kesadaran.....89

DAFTAR PUSTAKA.....91

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Ilustrasi Apa yang Tampak vs Apa yang Dirasakan 2
Gambar 2. Ilustrasi Siklus Tambal Sulam 11
Gambar 3. Tabel Kontrak Politik 20
Gambar 4. Ilustrasi Rakyat Sebagai Subjek vs Objek 30
Gambar 5. Ilustrasi Pancasila ibarat Bangunan 38
Gambar 6. Daur Ulang Pemaknaan Pancasila 39
Gambar 7. Ilustrasi Gambar Kerja Kekuasaan 47
Gambar 8. Ilustrasi Ilusi Stabilitas dan Kebohongan Sistemik 56
Gambar 9. Ilustrasi Mengapa Menambal Tidak Pernah Cukup 67
Gambar 10. Ilustrasi Amandemen sebagai Mekanisme Sah 71
Gambar 11. Ilustrasi Dari Rakyat Baik ke Rakyat Berdaulat 83
Gambar 12. Ilustrasi Membangun Ulang Denah Harapan 86

BAB I
BANGUNAN YANG TAMPAK MEGAH, TAPI BOCOR

Kita terbiasa melihat negara dari jauh, seperti bangunan megah yang jarang kita masuki. Dari kejauhan, ia tampak kokoh. Simbolnya berdiri tegak. Statistiknya disampaikan dengan percaya diri. Pidatonya terstruktur. Upacaranya khidmat. Semuanya memberi kesan bahwa bangunan besar bernama Indonesia ini berdiri dengan mantap. Namun pengalaman sehari-hari seringkali menghadirkan kesan yang berbeda.

Di ruang pelayanan publik, proses terasa berbelit. Dalam urusan hukum, rasa adil tidak selalu sejalan dengan logika sederhana masyarakat. Dalam ekonomi, banyak orang bekerja keras, tetapi merasa hasilnya tidak pernah benar-benar cukup. Negara tampak hadir dalam banyak aturan, tetapi perlindungannya terasa tidak selalu merata. Perbedaan antara yang tampak dan yang dirasakan inilah yang menjadi titik awal buku ini.

Kita tidak sedang berbicara tentang peristiwa luar biasa. Bukan tentang krisis besar yang mengguncang dunia. Yang dibicarakan di sini adalah pengalaman yang berulang dan perlahan membentuk kebiasaan. Kebocoran kecil yang terjadi terus-menerus, hingga tanpa disadari dianggap sebagai bagian wajar dari kehidupan bernegara.

Kita terbiasa dengan antrean panjang. Kita terbiasa dengan kebijakan yang berubah-ubah. Kita terbiasa dengan keputusan yang terasa jauh dari suara rakyat. Karena terbiasa, kita berhenti mempertanyakannya.



Gambar 1. Ilustrasi Apa yang Tampak vs Apa yang Dirasakan

Negara yang Terlihat Kuat

Jika diukur dari berbagai indicator makro, negara ini tampak kuat. Pertumbuhan ekonomi diumumkan. Stabilitas politik diklaim terjaga. Pembangunan fisik terlihat di berbagai daerah. Jalan dibangun, gedung berdiri, infrastruktur diperluas. Secara kasat mata, semua itu memberi kesan kemajuan.

Namun kekuatan sebuah negara tidak hanya diukur dari angka dan beton. Ia juga diukur dari pengalaman warganya. Apakah warga merasa dilindungi? Apakah hukum terasa adil? Apakah

kebijakan publik benar-benar mempermudah kehidupan sehari-hari? Di sinilah seringkali muncul jarak.

Angka bisa menunjukkan pertumbuhan, tetapi pengalaman bisa menunjukkan tekanan. Statistik bisa menunjukkan peningkatan, tetapi rasa aman belum tentu mengikuti. Negara tampak kuat di laporan, namun dalam percakapan sehari-hari, keluhan tetap berulang.

Kita mungkin tidak menyebutnya sebagai masalah besar. Kita lebih sering menyebutnya sebagai tantangan. Sesuatu yang "masih dalam proses perbaikan". Kalimat itu terdengar masuk akal. Setiap negara tentu berproses.

Namun ketika "proses" berlangsung terlalu lama, dan keluhan yang sama terus muncul di berbagai sektor, wajar jika kita mulai bertanya, yaitu apakah ini sekadar proses, atau ada sesuatu yang lebih mendasar?

Kebocoran yang Berulang

Bayangkan sebuah rumah besar yang dihuni bersama. Dari luar, rumah itu tampak megah. Catnya rapi. Halamannya luas. Gerbangnya kokoh. Siapa pun yang melihat dari luar mungkin akan berkata bahwa rumah itu baik-baik saja.

Tetapi di dalamnya, ada titik-titik kecil yang terus meneteskan air. Atapnya tidak roboh. Dindingnya tidak runtuh. Namun di beberapa sudut, air merembes perlahan.

Pada awalnya, penghuni rumah hanya menaruh wadah kecil. Tidak terlalu mengganggu. Lama-

kelamaan, titik kebocoran bertambah. Wadah diperbanyak. Lantai lebih sering dikeringkan. Aktivitas tetap berjalan.

Tanpa disadari, para penghuni mulai menyesuaikan hidup dengan kebocoran itu. Yang semula dianggap gangguan sementara, perlahan menjadi bagian dari rutinitas. Tidak ada yang panik, karena tidak ada yang benar-benar runtuh. Tetapi tidak ada pula yang sungguh-sungguh memeriksa atapnya.

Metafora ini tidak dimaksudkan untuk menyederhanakan persoalan negara. Ia hanya membantu kita melihat satu pola yaitu kebocoran kecil yang berulang seringkali lebih berbahaya daripada keruntuhan mendadak. Keruntuhan memaksa orang bertindak. Kebocoran kecil justru mengundang penyesuaian.

Negara pun demikian. Ketika pelayanan publik kurang efektif, kita mencari jalan pintas. Ketika regulasi membingungkan, kita belajar mengakali. Ketika sistem terasa tidak berpihak, kita mencari cara bertahan. Kita menjadi adaptif.

Adaptasi itu menunjukkan daya tahan rakyat. Namun ia juga bisa menutupi masalah yang lebih dalam.

Mengapa Kerusakan Sulit Ditunjuk

Salah satu hal yang membuat kebocoran sistemik sulit ditangani adalah karena ia tidak pernah hadir dalam satu bentuk yang jelas. Ia tersebar di berbagai sektor. Sedikit di hukum, sedikit di ekonomi, sedikit di birokrasi, sedikit di pelayanan sosial.

Karena tersebar, sulit menunjuk satu titik dan akhirnya kita berkata “Di sinilah masalahnya.”

Seringkali, yang disorot adalah individu. Pejabat tertentu disalahkan. Kebijakan tertentu dikritik. Periode tertentu dibandingkan dengan periode lain. Pergantian orang dianggap sebagai solusi.

Pergantian memang perlu dalam sistem demokrasi. Evaluasi individu juga penting. Namun ketika masalah serupa tetap muncul meski orangnya berganti, wajar jika kita mulai melihat pola yang lebih luas.

Jika kebocoran terus terjadi di berbagai ruangan, mungkin persoalannya bukan pada penghuni, melainkan pada desain atapnya.

Ini bukan kesimpulan yang terburu-buru. Ini adalah pertanyaan yang muncul dari pengamatan sederhana yakni, mengapa keluhan yang sama terdengar dari generasi ke generasi? Mengapa rasa tidak puas terhadap sistem seringkali melintasi pergantian kepemimpinan?

Tanpa disadari, kita sering terjebak pada perdebatan siapa yang salah, sementara jarang membahas bagaimana sistem itu dirancang.

Negara sebagai Rumah Bersama

Negara bukan entitas abstrak yang melayang di atas masyarakat. Ia adalah sistem yang dibangun untuk mengatur kehidupan bersama. Ia memiliki struktur, aturan, pembagian kewenangan, dan mekanisme pengawasan.

Dalam konteks ini, negara dapat dianalogikan sebagai rumah bersama yang dirancang untuk melindungi seluruh penghuninya.

Rumah yang baik tidak hanya terlihat indah dari luar. Ia juga nyaman dan aman di dalam. Sirkulasinya jelas. Beban bangunannya terdistribusi dengan tepat. Fungsinya berjalan sesuai tujuan awal perancangannya. Ketika ada gangguan kecil, rumah yang dirancang dengan baik tidak langsung menimbulkan dampak berantai. Tetapi jika desain dasarnya kurang tepat, gangguan kecil bisa menjalar.

Dalam kehidupan bernegara, desain dasar itu tercermin dalam struktur ketatanegaraan dan konstitusi. Di sanalah ditentukan bagaimana kekuasaan dibagi, bagaimana pengawasan dilakukan, dan bagaimana hubungan antara rakyat dan pemerintah dibentuk.

Namun sebelum sampai pada pembahasan teknis tersebut, penting untuk menyepakati satu hal terlebih dahulu yaitu, jika keluhan terasa di banyak tempat sekaligus, kemungkinan besar ada persoalan pada fondasi perancangannya.

Kebiasaan yang Membuat Kita Diam

Kita terbiasa melihat masalah sebagai bagian dari dinamika. Kita terbiasa mengatakan bahwa tidak ada sistem yang sempurna. Itu benar. Tidak ada sistem yang sepenuhnya tanpa cela.

Namun ada perbedaan antara ketidaksempurnaan yang wajar dan kebocoran yang terus berulang tanpa arah perbaikan yang jelas.

Seringkali, karena masalah tidak pernah benar-benar meledak menjadi keruntuhan total, kita memilih untuk bersabar. Kesabaran adalah sikap mulia. Tetapi dalam konteks desain sistem, kesabaran yang terlalu lama bisa berubah menjadi pembiaran.

Kita mungkin berkata bahwa negara sedang berbenah. Namun jika benah itu tidak menyentuh akar perancangan, perbaikan yang dilakukan hanya bersifat permukaan.

Cat bisa diperbarui. Tampilan bisa diperindah. Namun jika struktur tidak disesuaikan, kebocoran akan muncul kembali dalam bentuk lain.

Premis Dasar Buku Ini

Bab ini tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan bahwa negara berada dalam keadaan runtuh. Ia juga tidak bermaksud mengatakan bahwa semua yang ada tidak bekerja sama sekali.

Premis dasar buku ini lebih sederhana, tetapi lebih mendasar yaitu adanya indikasi bahwa sebagian masalah yang kita rasakan bukan semata-mata persoalan pelaku, melainkan persoalan desain.

Masalah desain tidak selalu terlihat jelas. Ia bekerja perlahan. Ia membentuk pola. Ia memengaruhi cara keputusan dibuat, cara kebijakan dirumuskan, dan cara kekuasaan dijalankan.

Ketika desain kurang tepat, orang-orang yang berniat baik pun bisa menghasilkan dampak yang tidak sesuai harapan. Sebaliknya, dalam desain yang sehat, kesalahan individu dapat dibatasi dampaknya oleh sistem pengawasan yang kuat.

Karena itu, sebelum kita berbicara tentang siapa yang menjalankan negara, penting untuk memahami bagaimana negara itu dirancang.

Menggeser Cara Pandang

Bab ini mengajak pembaca untuk melakukan satu pergeseran sederhana yaitu dari melihat masalah sebagai serangkaian peristiwa, menjadi melihatnya sebagai pola.

Dari melihat individu, menjadi melihat struktur. Dari menyalahkan orang, menjadi mempertanyakan desain.

Pergeseran ini tidak dimaksudkan untuk menghilangkan tanggung jawab individu. Ia hanya menempatkan tanggung jawab itu dalam konteks yang lebih luas.

Jika sebuah rumah seringkali mengalami kebocoran di banyak titik, mungkin sudah waktunya untuk memeriksa gambarnya. Bukan untuk meruntuhkannya, melainkan untuk memastikan bahwa ia benar-benar berfungsi sesuai tujuan awalnya.
Kita tidak sedang mencari kambing hitam. Kita sedang mencari kejelasan.

Dan kejelasan itu dimulai dari keberanian untuk mengatakan, jika sesuatu terasa tidak beres secara luas dan berulang, mungkin ada yang salah secara mendasar.

Bab-bab berikutnya akan mengajak kita melihat lebih dalam tentang bagaimana desain negara dibentuk, bagaimana nilai-nilai dasarnya diterjemahkan, dan

bagaimana posisi rakyat perlahan bergeser dalam struktur tersebut.

Untuk saat ini, cukup jika kita menyepakati satu hal yaitu apa yang tampak kuat dari luar belum tentu sepenuhnya kokoh di dalam. Dan kebocoran yang perlahan tidak boleh terus-menerus dianggap sebagai bagian wajar dari kehidupan bernegara.

Karena rumah bersama seharusnya tidak menuntut penghuninya untuk terus menyesuaikan diri dengan atap yang bocor. Ia seharusnya dirancang untuk melindungi mereka.

Di titik inilah pertanyaan tentang desain menjadi relevan. Dan dari sinilah buku ini benar-benar dimulai.

BAB 2
KEPEDULIAN YANG SALAH ARAH

Jika pada bab sebelumnya kita membicarakan kebocoran yang terasa di banyak sudut rumah bernama negara, maka pada bab ini kita perlu melihat satu hal yang lebih sensitif yaitu bagaimana kita merespons kebocoran itu.

Tidak semua respons keliru. Banyak di antaranya lahir dari niat yang tulus. Namun niat yang tulus tidak selalu menghasilkan dampak yang tepat. Dalam konteks negara yang mengalami kebocoran sistemik, respons yang tampak baik bisa saja justru memperpanjang persoalan.

Di sinilah kita perlu berbicara tentang kepedulian.

Rakyat yang Rajin Menambal

Kita sering menyaksikan hal yang sama berulang kali. Ketika ada warga yang kesulitan mengakses layanan kesehatan, masyarakat bergerak menggalang dana. Ketika ada korban ketidakadilan, solidaritas dikumpulkan. Ketika ada kebijakan yang menyulitkan kelompok tertentu, komunitas sipil berinisiatif membantu.

Semua itu menunjukkan satu hal yaitu rakyat Indonesia memiliki daya empati yang tinggi. Gotong royong bukan sekadar slogan. Ia hidup dalam praktik sehari-hari.

Namun perlahan muncul sebuah pola yang jarang kita pertanyakan.

Semakin sering terjadi kebocoran, semakin cepat pula rakyat bereaksi menambalnya. Bantuan terkumpul dalam hitungan jam. Relawan bergerak dalam hitungan hari. Media sosial dipenuhi ajakan peduli.

Yang jarang ditanyakan adalah, mengapa kebocoran itu terus berulang?

Ketika respons kolektif menjadi sangat cepat dan efisien, sistem yang bocor justru mendapat ruang untuk tidak berubah. Rumah tetap berdiri. Aktivitas tetap berjalan. Krisis tertutup oleh kepedulian.

Tanpa disadari, kita menciptakan mekanisme darurat yang permanen.



Gambar 2. Ilustrasi Siklus Tambal Sulam

Gotong Royong yang Dipuji, Tapi Dimanfaatkan

Gotong royong adalah nilai yang patut dibanggakan. Ia menjadi kekuatan sosial yang membuat masyarakat tetap bertahan di tengah keterbatasan.

Namun dalam sistem yang kurang sehat, gotong royong bisa berubah fungsi.

Yang semula menjadi solidaritas antarwarga, perlahan menjadi penyangga kelemahan sistem.
Ketika pelayanan publik tidak optimal, masyarakat menutupi kekurangannya. Ketika regulasi tidak jelas, masyarakat mencari cara alternatif. Ketika perlindungan sosial belum menjangkau semua, komunitas bergerak menggantikannya.

Negara tetap berjalan. Statistik tetap menunjukkan stabilitas. Dan karena tidak ada keruntuhan besar, desain yang kurang tepat tidak pernah benar-benar diperiksa.

Gotong royong yang dipuji seringkali membuat kita merasa bangga sebagai bangsa. Namun rasa bangga itu bisa menutupi pertanyaan yang lebih mendasar yakni apakah sistem yang baik seharusnya bergantung terus-menerus pada pengorbanan warganya?

Pertanyaan ini tidak bermaksud merendahkan gotong royong. Ia hanya ingin menempatkannya pada proporsi yang tepat. Solidaritas adalah kekuatan sosial. Tetapi ia bukan pengganti desain negara yang sehat.

Ketika Kepedulian Menjadi Identitas

Di era digital, kepedulian tidak hanya menjadi tindakan, tetapi juga identitas. Kita melihatnya setiap hari. Unggahan tentang bantuan. Foto kegiatan sosial. Pernyataan empati. Tagar solidaritas.

Tidak ada yang salah dengan itu. Berbagi dan mengajak orang lain peduli adalah hal yang baik.

Namun ketika kepedulian menjadi bagian dari citra diri, muncul potensi yang lebih rumit.

Kita mulai mengukur diri dari seberapa aktif kita membantu. Kita merasa berada di posisi moral yang lebih tinggi ketika terlibat dalam aksi sosial. Tanpa disadari, kepedulian berubah dari respons terhadap masalah menjadi bagian dari narasi tentang diri kita sendiri.

Di titik ini, fokus bisa bergeser.

Yang semula tentang memperbaiki keadaan, perlahan menjadi tentang mempertahankan identitas sebagai orang yang peduli. Yang semula tentang mengurangi kebocoran, menjadi tentang memastikan kita terlihat hadir saat kebocoran itu terjadi.

Sekali lagi, ini bukan tuduhan. Ini pengamatan tentang pola yang semakin umum.

Jika kepedulian menjadi identitas, maka keberadaan masalah justru menjaga identitas itu tetap hidup. Tanpa kebocoran, tidak ada ruang untuk menunjukkan kepedulian.

Di sinilah muncul pertanyaan yang tidak nyaman yaitu apakah tanpa sadar kita menjadi terlalu terbiasa dengan kebocoran?

Normalisasi Kebocoran

Ketika kebocoran terjadi sekali, kita menyebutnya insiden. Ketika terjadi dua kali, kita menyebutnya kelalaian. Tetapi ketika terjadi berkali-kali dan tetap dianggap wajar, ia berubah menjadi normalitas.

Kita mulai berbicara tentang "risiko biasa". Kita mengatakan bahwa "memang begitulah sistemnya". Kita menghibur diri dengan membandingkan keadaan dengan negara lain yang mungkin lebih buruk.
Semua itu memberi rasa nyaman sementara. Namun rasa nyaman itu bisa membuat kita berhenti menuntut perubahan desain.

Jika setiap kebocoran selalu ditutup oleh solidaritas, maka sistem tidak pernah dipaksa menghadapi konsekuensi desainnya. Ia tetap berjalan, meski dengan tambalan di sana-sini.

Rumah yang atapnya bocor tetapi selalu segera dikeringkan tidak pernah benar-benar terasa darurat. Para penghuni menyesuaikan diri. Wadah diperbanyak. Aktivitas tetap berlangsung.

Yang perlahan hilang adalah standar tentang seperti apa rumah yang seharusnya.

Antara Niat dan Dampak

Penting untuk membedakan antara niat dan dampak. Niat membantu adalah hal yang baik. Namun dampaknya perlu dilihat secara lebih luas.

Jika bantuan terus-menerus menggantikan fungsi sistem, maka sistem tidak terdorong untuk berubah. Jika solidaritas selalu menutup celah, maka celah itu tidak pernah dianggap mendesak untuk diperbaiki.

Dalam jangka pendek, bantuan meringankan beban. Dalam jangka panjang, ia bisa menunda perbaikan struktural.

Ini bukan argumen untuk berhenti membantu. Ia adalah ajakan untuk melihat bantuan dalam konteks yang lebih besar. Apakah bantuan kita disertai pertanyaan tentang akar masalah? Ataukah ia berhenti pada penanganan gejala?

Kita sering merasa puas setelah membantu. Rasa puas itu manusiawi. Namun rasa puas tidak selalu berarti masalah telah selesai. Bisa jadi yang selesai hanyalah rasa bersalah kita.

Pertanyaan yang lebih sulit adalah apabila bantuan telah diberikan, apakah desain yang menyebabkan kebocoran ikut disentuh?

Mengalihkan Beban Secara Halus

Dalam sistem yang kurang tepat, ada kecenderungan mengalihkan beban secara halus. Yang semula menjadi tanggung jawab institusi, perlahan menjadi tanggung jawab moral warga.

Misalnya, ketika pelayanan publik tidak menjangkau semua lapisan, masyarakat didorong untuk "lebih peduli". Ketika pengawasan lemah, masyarakat diminta "lebih aktif mengawasi". Ketika kebijakan tidak efektif, masyarakat diajak "lebih sabar dan memahami".

Semua ajakan itu terdengar masuk akal. Tidak ada yang tampak salah. Namun jika dicermati, ada pergeseran peran yang terjadi.

Rakyat yang semula berada pada posisi pemilik kedaulatan, perlahan lebih sibuk sebagai penanggung akibat. Energi habis untuk mengatasi dampak, bukan untuk memperbaiki desain.

Tanpa disadari, kepedulian menjadi alat untuk menjaga stabilitas yang rapuh.

Gelisah yang Diperlukan

Bab ini tidak bermaksud membuat pembaca merasa bersalah. Sebaliknya, ia mengajak pembaca merasakan satu hal yang lebih konstruktif yaitu gelisah. Gelisah bukan karena kita peduli. Gelisah karena mungkin kepedulian kita belum diarahkan ke tempat yang tepat.

Gelisah karena mungkin selama ini kita terlalu cepat merasa telah berbuat cukup, padahal sistem yang melahirkan kebocoran tetap utuh.

Gelisah karena mungkin tanpa sadar kita ikut menjaga agar rumah yang bocor tetap dihuni tanpa pernah diperiksa atapnya.

Gelisah semacam ini bukan sesuatu yang harus dihindari. Ia justru bisa menjadi awal dari kesadaran baru.

Kepedulian yang Diperlukan

Kepedulian tetap diperlukan. Solidaritas tetap penting. Gotong royong tetap menjadi kekuatan sosial. Namun kepedulian yang dibutuhkan tidak berhenti pada tambalan.

Ia perlu disertai keberanian untuk bertanya, mengapa kebocoran ini terus muncul?

Ia perlu disertai kesediaan untuk melihat struktur, bukan hanya gejala.

Ia perlu bergerak dari sekadar menolong korban, menuju memperbaiki desain yang melahirkan korban.

Kepedulian yang matang bukan hanya respons emosional. Ia adalah kepedulian yang sadar akan posisi dan tanggung jawabnya.

Pertanyaan yang Muncul

Pada titik ini, pembaca mungkin mulai bertanya dalam hati, apakah selama ini saya terlalu puas dengan tindakan kecil? Apakah bantuan yang saya banggakan justru memperpanjang keadaan yang seharusnya diubah?

Pertanyaan itu tidak perlu dijawab dengan rasa bersalah. Ia cukup dijawab dengan kejujuran.

Kita semua hidup di dalam sistem yang sama. Kita belajar menyesuaikan diri. Kita terbiasa menyelesaikan masalah secara praktis. Tidak ada yang secara sengaja ingin memperpanjang kerusakan.

Namun jika pola yang sama terus terjadi, mungkin sudah waktunya mengarahkan kepedulian pada level yang berbeda.

Menuju Bab Berikutnya

Jika pada bab ini kita melihat bagaimana kepedulian bisa salah arah, maka pada bab berikutnya kita akan membahas pergeseran posisi yang lebih jelas, yaitu bagaimana rakyat perlahan berpindah dari pemilik rumah menjadi tukang darurat.

Perubahan posisi itu tidak terjadi dalam semalam. Ia berlangsung perlahan, melalui kebiasaan, melalui normalisasi, melalui kebanggaan yang tidak pernah diuji ulang.

Untuk saat ini, cukup jika pembaca membawa satu kesadaran yakni kebaikan tetap penting, tetapi kebaikan yang tidak menyentuh akar persoalan bisa menjadi bagian dari masalah itu sendiri.

Dan jika ada rasa tidak nyaman setelah membaca bab ini, mungkin rasa itu bukan tanda bahwa kita salah, melainkan tanda bahwa kita sedang mulai melihat lebih dalam. Di situlah proses berpikir yang lebih jujur dimulai.

SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

BAB 3
KETIKA PEMILIK RUMAH MENJADI TUKANG

Jika pada bab sebelumnya kita melihat bagaimana kepedulian dapat salah arah, maka pada bab ini kita perlu berbicara lebih tegas tentang satu pergeseran yang jauh lebih mendasar yaitu perubahan posisi rakyat dalam struktur negara.

Pergeseran ini tidak terjadi dalam satu momen dramatis. Ia berlangsung perlahan, melalui kebiasaan, melalui bahasa yang digunakan, melalui cara masalah dijelaskan dan diselesaikan.

Pergeseran itu adalah perubahan dari rakyat sebagai pemilik kedaulatan menjadi rakyat sebagai penanggung akibat. Dengan kata lain, pemilik rumah perlahan berubah menjadi tukang darurat.

Negara dan Logika Kontrak

Dalam teori pemerintahan modern, negara tidak berdiri di atas kebaikan hati penguasa. Ia berdiri di atas prinsip kontrak. Rakyat memberikan mandat. Pemerintah menjalankan mandat tersebut. Di dalam hubungan itu terdapat hak dan kewajiban yang jelas.

Rakyat membayar pajak.

Rakyat mematuhi hukum.

Rakyat memberikan legitimasi melalui mekanisme pemilu.

Sebagai imbalannya, negara wajib memberikan perlindungan, keadilan, dan kepastian hukum.

Ini bukan hubungan belas kasihan. Ini hubungan kontraktual.

Jika sebuah perusahaan menerima bayaran untuk membangun dan merawat rumah, maka perusahaan itu memiliki kewajiban profesional untuk memastikan rumah tersebut aman dan berfungsi dengan baik. Pemilik tidak diwajibkan turun tangan memperbaiki atap yang bocor setiap kali hujan turun.

Namun dalam praktik bernegara, seringkali terjadi pembalikan yang halus.

Ketika ada kegagalan pelayanan, rakyat diminta memahami.

Ketika ada kebijakan yang tidak efektif, rakyat diminta bersabar.

Ketika ada kesalahan sistemik, rakyat diminta berpartisipasi menanggung dampaknya.

Seolah-olah kontrak itu berubah sepihak.



Gambar 3. Tabel Kontrak Politik

Pajak dan Ilusi Kewajiban Satu Arah

Pajak sering disebut sebagai kewajiban warga negara. Itu benar. Pajak adalah kontribusi finansial untuk menjalankan fungsi negara. Namun pajak bukan sekadar kewajiban. Ia juga simbol relasi timbal balik.

Ketika rakyat membayar pajak, mereka tidak sekadar menyetor dana. Mereka sedang mempercayakan pengelolaan sumber daya kepada negara.

Kepercayaan itu mengandung tuntutan yaitu transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas.

Namun dalam praktik sehari-hari, narasi yang lebih sering muncul adalah tentang kewajiban rakyat, bukan tentang kewajiban pemerintah. Rakyat diingatkan untuk taat. Rakyat diingatkan untuk tidak lalai. Rakyat diingatkan untuk patuh.

Jarang terdengar dengan nada yang sama kuat tentang kewajiban pemerintah untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikumpulkan benar-benar kembali dalam bentuk layanan yang adil dan efektif.

Ketika terjadi kebocoran anggaran atau kegagalan kebijakan, dampaknya tetap harus ditanggung masyarakat. Entah dalam bentuk kenaikan harga, penurunan kualitas layanan, atau beban tambahan lainnya.

Di titik ini, logika kontrak mulai kabur.
Pemilik membayar, tetapi tetap diminta memperbaiki kerusakan yang terjadi akibat pengelolaan yang kurang tepat.

Mandat yang Disederhanakan

Dalam sistem demokrasi, mandat diberikan melalui pemilihan umum. Rakyat memilih wakil dan pemimpin untuk mengelola pemerintahan. Mandat itu bukan cek kosong. Ia memiliki batas waktu dan batas fungsi.

Namun dalam praktiknya, mandat seringkali dipersempit menjadi legitimasi untuk memutuskan tanpa kontrol yang memadai. Kritik dianggap gangguan. Evaluasi dianggap ancaman stabilitas.

Akibatnya, hubungan antara rakyat dan pemerintah perlahan berubah. Rakyat tidak lagi merasa sebagai pemberi mandat, tetapi sebagai pihak yang harus menerima keputusan.

Ketika ada kebijakan yang berdampak luas, rakyat lebih sering diminta menyesuaikan diri daripada diajak meninjau kembali kebijakan tersebut. Adaptasi menjadi kewajiban warga, bukan koreksi menjadi kewajiban pengelola.

Pergeseran ini tidak selalu terlihat dramatis. Ia hadir dalam bahasa sehari-hari, seperti "Sudah diputuskan." "Itu kebijakan pusat." "Kita harus mengikuti aturan."

Semua itu terdengar wajar. Namun jika diperhatikan, posisi rakyat semakin jauh dari posisi pemilik.

Menanggung Akibat yang Bukan Dirancang Sendiri

Salah satu tanda paling jelas dari pembalikan peran adalah ketika rakyat harus menanggung akibat dari keputusan yang tidak mereka rancang.

Jika sebuah proyek publik direncanakan kurang matang dan kemudian menimbulkan kerugian, masyarakat tetap harus membayar melalui pajak dan penyesuaian anggaran. Jika regulasi tidak sinkron dan menimbulkan biaya ekonomi tambahan, pelaku usaha kecil dan pekerja yang pertama kali merasakan dampaknya.

Dalam situasi seperti itu, rakyat seringkali tidak memiliki ruang untuk menolak dampaknya. Mereka hanya bisa menyesuaikan diri.

Penyesuaian ini sering disebut sebagai ketahanan. Memang ada ketahanan di dalamnya. Namun ketahanan tidak seharusnya menjadi alasan untuk membiarkan pola yang sama terus berulang.

Ketika dampak kesalahan desain selalu dialihkan kepada warga, ada ketidakadilan struktural yang sedang bekerja.

Normalisasi Penderitaan

Ada satu narasi yang sering muncul dalam berbagai bentuk yaitu bahwa penderitaan adalah bagian dari perjuangan bangsa. Bahwa kesulitan adalah harga yang harus dibayar untuk pembangunan. Bahwa rakyat harus rela berkorban demi masa depan.

Narasi pengorbanan memiliki tempatnya dalam sejarah. Namun ketika pengorbanan terus-menerus diminta dari pihak yang sama, sementara desain sistem tidak berubah, pengorbanan itu kehilangan maknanya.

Penderitaan yang dinormalisasi bukan lagi pengorbanan. Ia menjadi pola.

Rakyat dipuji karena ketabahannya. Rakyat disanjung karena kesabarannya. Namun jarang ada evaluasi serius tentang mengapa kesabaran itu terus diuji.

Di sinilah perlu muncul rasa tidak nyaman.

Bukan karena rakyat menderita. Bukan karena rakyat tidak kuat. Tetapi karena sistem seharusnya dirancang untuk meminimalkan penderitaan yang tidak perlu.

Ketika penderitaan dianggap sebagai kebajikan, sistem yang melahirkannya cenderung dibiarkan.

Peran yang Dipersempit

Jika kita kembali pada metafora rumah, pemilik memiliki hak untuk menentukan desain dan mengevaluasi pekerja. Namun dalam praktik bernegara, rakyat seringkali dipersempit perannya hanya sebagai pemilih periodik dan pembayar pajak.

Setelah memilih, rakyat kembali menjadi penonton. Setelah membayar, rakyat kembali diminta patuh.

Partisipasi publik seringkali terbatas pada forum formal yang tidak selalu berdampak pada keputusan akhir. Kritik seringkali dibalas dengan penjelasan teknis yang sulit dipahami.

Akibatnya, jarak antara pengelola dan pemilik semakin lebar.

Di titik ini, wajar jika muncul rasa tersinggung secara sadar. Bukan tersinggung secara emosional, melainkan tersinggung karena menyadari bahwa posisi yang seharusnya kuat ternyata telah direduksi.

Ini Tidak Adil

Ketika pemilik rumah membayar untuk perawatan, tetapi tetap harus memperbaiki atap setiap kali hujan, ada yang tidak adil.

Ketika rakyat memberikan mandat, membayar pajak, mematuhi hukum, tetapi tetap harus menanggung akibat dari desain yang kurang tepat, ada ketidakseimbangan dalam relasi tersebut.

Ketidakseimbangan ini seringkali dibungkus dalam bahasa teknis dan prosedural. Namun pada dasarnya ia menyentuh rasa keadilan yang sederhana.

Kontrak yang sehat bersifat timbal balik. Jika salah satu pihak terus-menerus menanggung beban tambahan, kontrak itu perlu ditinjau ulang.

Bab ini tidak mengajak pembaca untuk marah tanpa arah. Ia mengajak pembaca untuk marah secara terarah yakni marah pada pola yang mereduksi posisi rakyat, bukan pada individu semata.

Mengembalikan Posisi

Kesadaran bahwa posisi telah direduksi adalah langkah pertama untuk mengembalikannya. Rakyat bukan objek kebijakan. Rakyat bukan sekadar penerima dampak.

Rakyat adalah sumber legitimasi. Rakyat adalah pemberi mandat. Rakyat adalah pemilik kedaulatan.

Jika posisi ini diingat kembali secara kolektif, maka diskusi tentang desain negara menjadi relevan. Bukan sebagai wacana abstrak, tetapi sebagai

kebutuhan praktis untuk menyeimbangkan kembali relasi yang timpang.

Pergeseran dari pemilik menjadi tukang darurat tidak harus diterima sebagai keadaan permanen. Ia bisa dihentikan dengan kejelasan tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Menuju Pembahasan Desain

Pada bab berikutnya, kita akan mulai melihat lebih dalam bagaimana desain ketatanegaraan membentuk relasi ini. Bagaimana pembagian kewenangan dan mekanisme pengawasan dapat memperkuat atau justru melemahkan posisi rakyat.

Untuk saat ini, cukup jika kita menyadari satu hal penting yaitu banyak dari kita mungkin telah terbiasa menambal kebocoran tanpa menyadari bahwa kita sebenarnya adalah pemilik rumah tersebut.

Kesadaran ini mungkin terasa tidak nyaman. Namun dari ketidaknyamanan itulah lahir pertanyaan yang lebih berani yaitu jika posisi kita direduksi secara sistemik, apa yang perlu diubah agar ia kembali seimbang?

Pertanyaan itu akan membawa kita pada inti persoalan yang lebih dalam, tentang desain negara itu sendiri.

Dan di situlah pembahasan kita selanjutnya akan berfokus.

SEKOLAH
NEGARAWAN
X
SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

BAB IV
NEGARA YANG GAGAL MEMAHAMI KEDAULATAN RAKYAT

Jika pada bab sebelumnya kita membicarakan bagaimana posisi rakyat perlahan direduksi dari pemilik menjadi penanggung akibat, maka pada bab ini kita perlu melihat sisi lain dari relasi tersebut yaitu bagaimana negara memandang rakyat.

Hubungan antara negara dan rakyat tidak hanya ditentukan oleh aturan tertulis. Ia juga ditentukan oleh cara negara memahami kedaulatan itu sendiri. Apakah rakyat benar-benar diperlakukan sebagai subjek yang berdaulat, atau hanya sebagai objek kebijakan?

Pertanyaan ini penting, karena dari cara pandang inilah lahir pola relasi kuasa.

Rakyat sebagai Objek Kebijakan

Dalam praktik pemerintahan modern, negara memiliki berbagai instrumen untuk mengatur kehidupan masyarakat, mulai dari regulasi, perizinan, kebijakan fiskal, kebijakan sosial, hingga pengawasan administratif. Semua itu dibutuhkan untuk menjaga ketertiban dan menjalankan fungsi negara.

Namun ada perbedaan mendasar antara mengatur untuk melayani dan mengatur untuk mengendalikan.

Ketika rakyat diperlakukan sebagai subjek kedaulatan, kebijakan dirancang dengan asumsi bahwa rakyat adalah pemilik mandat. Artinya, kebijakan harus

dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka dan rasional. Dialog menjadi penting. Partisipasi bukan sekadar formalitas.

Sebaliknya, ketika rakyat diposisikan sebagai objek, kebijakan dirumuskan seolah-olah negara adalah pihak yang lebih tahu, sementara rakyat hanya perlu menerima dan menyesuaikan diri.

Dalam banyak situasi, kita dapat melihat kecenderungan kedua ini. Bahasa yang digunakan dalam komunikasi publik seringkali bersifat satu arah. Keputusan diumumkan. Rakyat diminta mengikuti. Kritik dibalas dengan penjelasan prosedural, bukan dengan evaluasi substantif.

Pola ini menunjukkan adanya jarak. Rakyat tidak sepenuhnya diperlakukan sebagai pemilik yang memiliki hak untuk menguji arah kebijakan, melainkan sebagai pihak yang harus memahami dan beradaptasi.

Bahasa Negara dan Cara Negara Berbicara

Cara negara berbicara tentang rakyat seringkali mencerminkan cara negara memahami kedaulatan.

Istilah seperti "pembinaan", "penertiban", "penyesuaian", dan "pengawasan" terdengar netral. Namun jika digunakan secara dominan, ia bisa menunjukkan bahwa rakyat lebih sering diposisikan sebagai pihak yang perlu diarahkan daripada sebagai mitra yang setara.

Dalam konteks tertentu, tentu saja pembinaan dan pengawasan diperlukan. Tidak semua intervensi negara bersifat negatif. Namun ketika pendekatan ini menjadi pola umum, muncul kesan bahwa negara lebih

sibuk mengatur perilaku warga daripada memastikan sistem bekerja adil.

Bahasa bukan sekadar alat komunikasi. Ia membentuk cara berpikir. Ketika rakyat terus-menerus disebut sebagai sasaran program, objek pembangunan, atau penerima manfaat, tanpa penekanan pada peran mereka sebagai pemilik kedaulatan, maka persepsi tentang relasi kuasa ikut bergeser.

Rakyat menjadi target, bukan penentu arah.



Gambar 4. Ilustrasi Rakyat Sebagai Subjek vs Objek

Populisme dan Simbolisme

Di sisi lain, ada fenomena yang tampak bertentangan tetapi sebenarnya berjalan bersamaan yaitu populisme dan simbolisme.

Populisme menjanjikan kedekatan dengan rakyat. Ia menekankan bahwa pemimpin memahami

kesulitan masyarakat. Ia menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah diterima.

Namun populisme tidak selalu identik dengan penguatan kedaulatan rakyat. Ia bisa saja berhenti pada simbol dan retorika.

Simbolisme hadir dalam bentuk kunjungan, pernyataan empati, dan narasi kebersamaan. Semua itu penting dalam representasi pemerintah. Namun jika tidak diikuti perubahan struktural, ia hanya menjadi penenang sementara.

Rakyat merasa diperhatikan, tetapi mekanisme pengambilan keputusan tetap tertutup. Rakyat merasa didengar, tetapi arah kebijakan tetap ditentukan secara terbatas.

Populisme yang tidak disertai reformasi desain bisa menjadi cara halus untuk meredakan kritik tanpa mengubah struktur.

Di titik ini, pembaca mungkin mulai melihat pola yaitu relasi kuasa tidak selalu bekerja secara kasar. Ia bisa bekerja melalui kehangatan simbolik yang membuat jarak struktural tidak terlalu terasa.

Negara yang Sibuk Mengatur

Salah satu ciri negara yang gagal memahami kedaulatan rakyat adalah kecenderungannya untuk memperluas pengaturan tanpa memperkuat pelayanan. Regulasi bertambah. Persyaratan administratif diperbarui. Prosedur diperinci. Semua itu diklaim sebagai upaya meningkatkan tertib dan efisiensi.

Namun di lapangan, warga seringkali merasakan bahwa mereka harus menyesuaikan diri dengan sistem

yang kompleks, sementara sistem itu sendiri tidak selalu responsif terhadap kebutuhan nyata.

Negara yang sibuk mengatur cenderung melihat masalah sebagai sesuatu yang harus dikendalikan, bukan dipahami. Setiap persoalan dijawab dengan aturan tambahan. Setiap pelanggaran dijawab dengan sanksi baru.

Pendekatan ini mungkin efektif dalam jangka pendek. Tetapi dalam jangka panjang, ia dapat memperlebar jarak antara pengelola dan pemilik kedaulatan.

Jika rakyat terus-menerus dihadapkan pada aturan tanpa ruang dialog yang setara, rasa kepemilikan terhadap negara akan melemah. Negara menjadi entitas yang mengawasi, bukan yang melayani.

Ketika Kritik Dianggap Gangguan

Dalam sistem yang sehat, kritik adalah bagian dari mekanisme koreksi. Ia membantu memperbaiki kebijakan sebelum dampaknya meluas. Kritik tidak dianggap ancaman, melainkan masukan.

Namun dalam praktik, kritik seringkali diposisikan sebagai gangguan stabilitas. Kritik dianggap merusak citra. Kritik disamakan dengan ketidaksetiaan.

Pola ini menunjukkan adanya ketidaknyamanan terhadap rakyat yang berpikir struktural.

Rakyat yang mempertanyakan desain kebijakan dianggap terlalu politis. Rakyat yang meminta transparansi dianggap tidak sabar. Rakyat yang

mengusulkan perubahan dianggap tidak memahami kompleksitas.

Padahal berpikir struktural adalah bagian dari kedaulatan. Kedaulatan tidak hanya berarti memilih pemimpin, tetapi juga berarti memiliki ruang untuk menguji dan mengevaluasi desain sistem.

Ketika ruang ini menyempit, relasi kuasa menjadi timpang.

Mengalihkan Kesalahan ke Sesama Rakyat

Salah satu dampak dari relasi kuasa yang timpang adalah kecenderungan menyalahkan sesama rakyat.

Ketika terjadi kegagalan kebijakan, seringkali yang disorot adalah perilaku individu warga. Jika ada pelanggaran, fokus pada warga yang melanggar. Jika ada ketidakteraturan, fokus pada masyarakat yang dianggap kurang disiplin.

Tentu saja tanggung jawab individu tetap ada. Namun ketika kegagalan bersifat sistemik, terlalu mudah menyederhanakannya menjadi masalah perilaku warga.

Akibatnya, energi publik habis dalam perdebatan horizontal. Warga saling menyalahkan. Kelompok tertentu dianggap penyebab masalah. Sementara desain yang memungkinkan masalah berulang tidak disentuh.

Pola ini menguntungkan struktur yang tidak ingin dievaluasi. Selama rakyat sibuk berdebat satu sama lain, perhatian terhadap relasi kuasa yang lebih besar menjadi kabur.

Di sinilah pembaca diajak berhenti menyalahkan sesama rakyat dan mulai melihat struktur yang membingkai interaksi tersebut.

Ketimpangan yang Tidak Kasat Mata

Relasi kuasa yang timpang tidak selalu tampak dalam bentuk represif. Ia bisa hadir dalam bentuk prosedur yang rumit, akses informasi yang terbatas, atau mekanisme partisipasi yang formal tetapi tidak substantif.

Rakyat mungkin diberi ruang menyampaikan pendapat, tetapi tidak memiliki pengaruh nyata dalam keputusan akhir. Forum konsultasi diadakan, tetapi rancangan kebijakan sudah ditentukan sebelumnya.

Semua itu berjalan sesuai prosedur. Tidak ada yang tampak melanggar aturan. Namun secara substansi, posisi rakyat tetap lemah.

Ketimpangan ini sulit dilihat jika kita hanya fokus pada insiden. Ia baru tampak jika kita melihat pola berulang dalam berbagai sektor.

Memahami Ulang Kedaulatan

Kedaulatan rakyat sering disebut sebagai prinsip dasar negara demokratis. Namun kedaulatan bukan sekadar pernyataan normatif. Ia harus tercermin dalam desain dan praktik.

Jika rakyat benar-benar berdaulat, maka mekanisme pengawasan terhadap kekuasaan harus kuat. Jika rakyat benar-benar pemilik mandat, maka proses pengambilan keputusan harus transparan dan dapat diuji.

Kedaulatan bukan berarti rakyat terlibat dalam setiap detail teknis kebijakan. Tetapi ia berarti rakyat memiliki posisi yang setara dalam menentukan arah dasar negara.

Ketika posisi ini melemah, negara mungkin tetap berjalan. Namun ia berjalan dengan relasi kuasa yang tidak seimbang.

Marah yang Terarah

Bab ini mungkin menimbulkan rasa tidak nyaman. Mungkin juga memunculkan kemarahan. Namun kemarahan yang dimaksud bukan kemarahan yang liar.

Ia adalah kemarahan intelektual, kemarahan yang lahir dari kesadaran bahwa relasi yang seharusnya setara ternyata tidak sepenuhnya demikian.

Kemarahan semacam ini tidak mengarah pada individu. Ia mengarah pada pola dan desain.

Dengan melihat pola, pembaca diharapkan berhenti menyederhanakan masalah sebagai kesalahan orang per orang. Pembaca mulai melihat bahwa relasi kuasa dibentuk oleh struktur yang lebih luas.

Dan dari pemahaman ini, muncul pertanyaan yang lebih dalam yaitu jika relasi kuasa timpang, di mana akar desainnya?

Menuju Pembahasan Desain Konstitusional

Pada bab berikutnya, kita akan mulai masuk lebih jauh ke wilayah desain ketatanegaraan. Bagaimana konstitusi sebagai desain teknis membentuk relasi antara rakyat dan negara. Bagaimana pembagian

kewenangan dapat memperkuat atau justru melemahkan kedaulatan rakyat.

Untuk saat ini, cukup jika pembaca menyadari satu hal yaitu ketimpangan relasi kuasa tidak selalu terlihat dalam peristiwa dramatis. Ia hadir dalam pola bahasa, pola kebijakan, dan pola respons terhadap kritik.

Ketika rakyat lebih sering diposisikan sebagai objek daripada subjek, ketika simbol lebih dominan daripada struktur, dan ketika kritik dianggap gangguan, ada indikasi bahwa negara belum sepenuhnya memahami kedaulatan rakyat.

Kesadaran ini adalah langkah awal untuk membongkar desain yang membentuknya.

Dan dengan kesadaran itulah kita melangkah ke inti persoalan yang lebih teknis namun lebih menentukan.

BAB 5
PANCASILA SEBAGAI FILOSOFI YANG DIKHIANATI

Di tengah perbincangan tentang desain negara dan relasi kuasa, kita tidak bisa menghindari satu fondasi paling mendasar yaitu Pancasila. Ia bukan sekadar simbol. Ia bukan sekadar pembuka pidato. Ia adalah dasar filosofis yang sejak awal dimaksudkan menjadi jiwa bangunan bernama Indonesia.

Namun di titik inilah kita perlu berhenti sejenak.

Jika banyak praktik kekuasaan terasa tidak selaras dengan rasa keadilan rakyat, apakah itu berarti Pancasila yang keliru? Ataukah ada jurang antara nilai yang diikrarkan dan desain yang diterapkan?

Bab ini tidak bermaksud menggugat Pancasila. Sebaliknya, ia ingin mengembalikannya ke posisi yang terhormat, sebagai filosofi arsitektur negara dan sekaligus melihat dengan jujur bagaimana penerjemahannya seringkali tidak setia pada jiwa tersebut.

Pancasila sebagai Filosofi Arsitektur

Dalam dunia arsitektur, sebelum denah dibuat dan gambar teknis disusun, selalu ada satu tahap awal yaitu penetapan filosofi desain. Filosofi ini menjawab pertanyaan mendasar yakni untuk siapa bangunan itu dibuat, nilai apa yang ingin diwujudkan, dan prinsip apa yang menjadi pedoman.

Pancasila menempati posisi yang serupa dalam bangunan negara Indonesia.



Gambar 5. Ilustrasi Pancasila ibarat Bangunan

Ketuhanan Yang Maha Esa menegaskan dimensi moral dan spiritual kehidupan bersama. Kemanusiaan yang adil dan beradab mengingatkan bahwa kekuasaan tidak boleh menginjak martabat manusia. Persatuan Indonesia menempatkan kebersamaan di atas fragmentasi. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan menegaskan bahwa keputusan publik harus lahir dari akal sehat kolektif. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengarahkan tujuan akhir penyelenggaraan negara.

Kelima sila itu bukan rangkaian kata yang berdiri sendiri. Ia membentuk satu kesatuan visi tentang negara yang beradab, adil, dan berpihak pada manusia.

Sebagai filosofi, Pancasila bukan alat legitimasi kekuasaan. Ia adalah batas moral kekuasaan.

Namun filosofi, sekuat apa pun nilainya, tidak bekerja otomatis. Ia harus diterjemahkan ke dalam desain institusional dan praktik kebijakan.

Di sinilah sering muncul persoalan.



Gambar 6. Daur Ulang Pemaknaan Pancasila

Nilai Kemanusiaan dan Praktik Kekuasaan

Sila kedua berbicara tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalimat ini sederhana, tetapi implikasinya luas. Ia menuntut agar setiap kebijakan publik mempertimbangkan martabat manusia. Ia menolak perlakuan sewenang-wenang. Ia menolak ketimpangan yang disengaja.

Namun dalam praktik, seringkali kebijakan dirumuskan dengan pendekatan yang sangat teknokratis, tanpa cukup ruang bagi pertimbangan kemanusiaan.

Aturan dibuat dengan bahasa yang kaku. Prosedur diterapkan secara seragam tanpa mempertimbangkan kondisi riil masyarakat. Penegakan hukum dilakukan dengan logika formal, tetapi tidak selalu dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Ketika warga kecil berhadapan dengan sistem yang kompleks, mereka tidak jarang merasa diperlakukan sebagai angka atau berkas, bukan sebagai manusia dengan cerita dan keterbatasan.

Di titik ini, jurang antara nilai dan praktik menjadi terasa.

Pancasila tidak mengajarkan kekuasaan yang dingin dan jauh. Ia mengajarkan kekuasaan yang beradab. Jika praktik yang terjadi terasa sebaliknya, maka persoalannya bukan pada sila, melainkan pada cara sila itu diterjemahkan.

Pancasila yang Diucap, Tapi Tidak Diinstitusikan

Setiap upacara kenegaraan menyebut Pancasila. Setiap pejabat bersumpah setia padanya. Ia diajarkan di sekolah dan dipasang di ruang-ruang publik. Secara simbolik, Pancasila sangat dihormati.

Namun penghormatan simbolik tidak selalu sejalan dengan penghormatan institusional.

Menghormati Pancasila secara institusional berarti memastikan bahwa desain lembaga negara, mekanisme pengawasan, dan pembagian kewenangan benar-benar mencerminkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Jika sila keempat menekankan permusyawaratan dan hikmat kebijaksanaan, maka desain pengambilan keputusan harus memberi ruang bagi partisipasi yang bermakna, bukan sekadar formalitas. Jika sila kelima berbicara tentang keadilan sosial, maka kebijakan ekonomi dan distribusi sumber daya harus dirancang untuk mengurangi ketimpangan, bukan sekadar meningkatkan angka pertumbuhan.

Ketika Pancasila lebih sering diucapkan daripada diinstitusikan, ia berisiko menjadi simbol kosong.

Simbol penting untuk identitas. Namun tanpa penerapan yang nyata, simbol tidak memiliki daya korektif terhadap kekuasaan.

Antara Ideologi dan Desain

Seringkali terjadi kekeliruan dalam memahami hubungan antara ideologi dan desain negara. Ideologi memberikan arah. Desain memberikan bentuk operasional. Tanpa desain yang tepat, ideologi tidak memiliki sarana untuk bekerja.

Pancasila sebagai ideologi memberi arah moral. Namun jika desain konstitusional dan kelembagaan tidak selaras, nilai itu tidak akan otomatis terwujud.

Misalnya, jika mekanisme pengawasan terhadap kekuasaan lemah, maka sila tentang keadilan dan permusyawaratan akan sulit dijaga dalam praktik. Jika

pembagian kewenangan terlalu terpusat, maka semangat kerakyatan bisa tereduksi menjadi formalitas.

Dalam situasi seperti itu, seringkali yang disalahkan adalah implementasi atau individu tertentu. Padahal, bisa jadi persoalannya ada pada struktur desain yang tidak cukup mencerminkan filosofi dasarnya.

Di sinilah muncul rasa kehilangan yang bermartabat yaitu kehilangan terhadap ideal yang pernah diyakini.

Menghindari Sinisme

Menghadapi jurang antara nilai dan praktik, ada dua respons ekstrem yang bisa muncul. Pertama, mempertahankan segala sesuatu dengan alasan stabilitas, tanpa mengakui adanya ketidaksesuaian. Kedua, menjadi sinis dan menyimpulkan bahwa nilai dasar itu sendiri tidak relevan.

Bab ini menolak kedua ekstrem tersebut.

Pancasila tidak perlu diserang untuk mengkritik praktik kekuasaan. Justru dengan menghormati Pancasila, kita memiliki dasar moral untuk mengoreksi penyimpangan.

Sinisme terhadap Pancasila hanya akan mengaburkan persoalan yang sebenarnya yaitu terjadi kegagalan dalam menerjemahkan nilai ke dalam desain yang konsisten.

Yang perlu ditinjau bukanlah filosofinya, melainkan kesetiaan desain terhadap filosofi tersebut.

Jurang yang Terasa

Banyak warga negara yang mungkin tidak mengungkapkannya secara eksplisit, tetapi merasakan jarak antara ideal dan realitas. Mereka mendengar tentang keadilan sosial, tetapi menyaksikan ketimpangan. Mereka mendengar tentang kerakyatan, tetapi merasa jauh dari proses pengambilan keputusan. Perasaan ini seringkali tidak diartikulasikan sebagai kritik terhadap Pancasila. Ia lebih sering muncul sebagai kelelahan atau apatisme.

Di sinilah risiko terbesar muncul. Ketika nilai yang seharusnya menjadi fondasi moral tidak terasa hadir dalam praktik, masyarakat bisa kehilangan kepercayaan, bukan hanya pada institusi, tetapi pada nilai itu sendiri.

Mencegah hal ini adalah tanggung jawab bersama.

Mengembalikan keselarasan antara Pancasila dan desain negara bukanlah upaya ideologis yang sempit. Ia adalah upaya menjaga agar fondasi moral bangsa tetap relevan dan hidup.

Pancasila sebagai Standar Evaluasi

Alih-alih hanya menjadi simbol, Pancasila seharusnya berfungsi sebagai standar evaluasi.

Apakah kebijakan tertentu mencerminkan kemanusiaan yang adil dan beradab? Apakah mekanisme pengambilan keputusan mencerminkan permusyawaratan yang bijaksana?

Apakah distribusi sumber daya mendekati keadilan sosial?

Pertanyaan-pertanyaan ini tidak bersifat retoris. Ia bisa menjadi alat ukur konkret terhadap desain dan praktik negara.

Jika desain kelembagaan membuat rakyat sulit mengakses keadilan, maka desain itu perlu dikaji ulang. Jika sistem perwakilan tidak cukup memberi ruang partisipasi, maka mekanismenya perlu diperbaiki.

Dengan cara ini, Pancasila tidak lagi menjadi sekadar rujukan seremonial, tetapi menjadi kompas operasional.

Kesedihan yang Bermartabat

Menyadari adanya jurang antara nilai dan praktik dapat menimbulkan kesedihan. Namun kesedihan ini bukan tanda kelemahan. Ia adalah tanda bahwa kita masih peduli terhadap nilai tersebut.

Kesedihan yang bermartabat berbeda dari keputusasaan. Ia tidak mengajak untuk meninggalkan Pancasila, tetapi untuk memperjuangkannya dalam bentuk yang lebih konsisten.

Jika kita benar-benar menghormati Pancasila, maka kita tidak akan puas dengan penerapan yang setengah hati. Kita tidak akan berhenti pada pengucapan. Kita akan menuntut desain yang setia pada jiwa tersebut.

Menuju Pembahasan Desain Teknis

Bab ini mengembalikan kita pada fondasi moral. Bab berikutnya akan membawa kita lebih jauh, pada pertanyaan tentang bagaimana konstitusi dan desain teknis negara menerjemahkan, atau gagal menerjemahkan filosofi tersebut.

Jika Pancasila adalah jiwa bangunan, maka konstitusi adalah gambar teknisnya. Jurang antara nilai dan praktik seringkali lahir dari ketidaksinkronan antara keduanya.

Dengan pemahaman ini, pembaca diharapkan tidak menjadi sinis terhadap Pancasila, melainkan justru lebih kritis terhadap penyimpangannya.

Karena pada akhirnya, mempertahankan nilai tanpa memperbaiki desain sama saja dengan menjaga simbol tanpa memastikan bangunan benar-benar kokoh.

Dan menjaga bangunan tanpa menjaga jiwanya akan membuat negara kehilangan arah.

Kesadaran tentang jurang ini bukan akhir dari pembahasan, melainkan awal dari upaya yang lebih sistematis untuk menata ulang desain negara agar kembali setia pada fondasi yang telah disepakati bersama.

Di sanalah perjalanan kita selanjutnya akan berlanjut.

BAB VI
Konstitusi sebagai Desain Teknis Kekuasaan

Jika Pancasila adalah filosofi arsitektur negara, maka Undang-Undang Dasar adalah gambar teknisnya.

Filosofi memberi arah. Desain teknis menentukan bagaimana arah itu dijalankan. Tanpa desain yang tepat, filosofi hanya menjadi niat baik yang tidak memiliki struktur operasional.

Di sinilah kita perlu berbicara secara lebih konkret.

Konstitusi bukan sekadar dokumen hukum. Ia adalah rancangan teknis tentang bagaimana kekuasaan dibagi, dibatasi, diawasi, dan dikendalikan. Ia menentukan siapa memegang kewenangan apa, bagaimana keputusan dibuat, dan bagaimana kesalahan dikoreksi.

Jika rumah negara terasa bocor di banyak sisi, dan relasi kuasa terasa timpang, maka masuk akal untuk melihat desain teknisnya.

Konstitusi sebagai Gambar Kerja Kekuasaan

Dalam dunia teknik, setelah filosofi dan konsep disepakati, dibuatlah gambar kerja. Gambar itu tidak bersifat abstrak. Ia menentukan ukuran, jarak, beban, dan hubungan antarbagian.

Konstitusi bekerja dengan cara yang sama.
Ia menentukan:

- bagaimana kekuasaan eksekutif dibentuk,
- bagaimana legislatif mengawasi,

- bagaimana yudikatif menjaga hukum,
- dan bagaimana rakyat terlibat dalam proses tersebut.

Jika pembagian ini seimbang, maka sistem cenderung stabil dan terkendali. Jika pembagian ini timpang, maka salah satu sisi akan menumpuk kuasa.

Masalahnya, ketimpangan tidak selalu terlihat jelas di permukaan. Ia bekerja melalui detail-detail yang tampak teknis, tetapi berdampak besar.

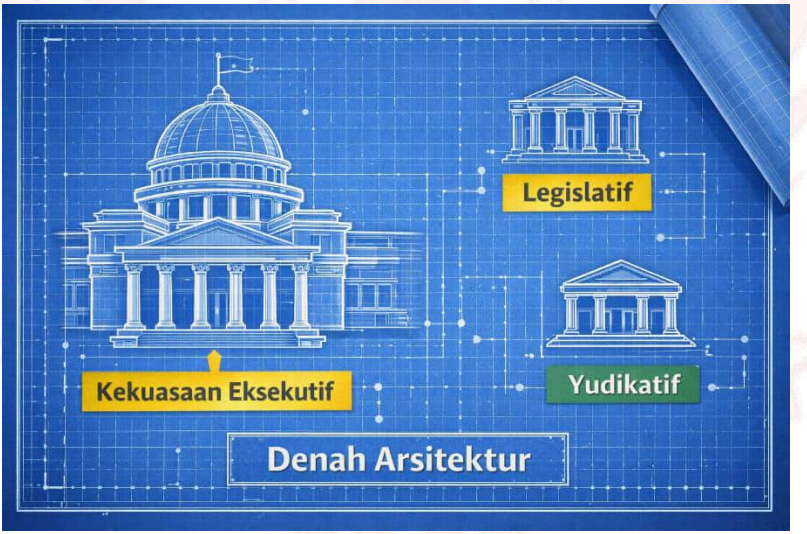

Gambar 7. Ilustrasi Gambar Kerja Kekuasaan

Pembagian Kewenangan yang Tidak Proporsional

Salah satu fungsi utama konstitusi adalah membagi kewenangan agar tidak terpusat di satu titik. Dalam teori, ini disebut sebagai mekanisme checks and balances.

Namun dalam praktik ketatanegaraan, pembagian ini bisa berubah melalui amandemen, interpretasi, atau praktik kekuasaan.

Ketika kewenangan tertentu diperluas tanpa diimbangi penguatan pengawasan, maka keseimbangan terganggu. Ketika lembaga pengawas tidak memiliki kekuatan efektif untuk mengoreksi, maka fungsi kontrol menjadi formalitas.

Akibatnya, kekuasaan dapat menumpuk tanpa perlawanan institusional yang memadai.

Menumpuknya kuasa tidak selalu berarti otoritarianisme terbuka. Ia bisa hadir dalam bentuk dominasi administratif, pengaruh kekuasaan yang luas, atau kemampuan menentukan arah kebijakan tanpa koreksi berarti.

Di sinilah muncul perasaan yang sering sulit dijelaskan oleh Masyarakat yaitu seolah-olah keputusan besar telah ditentukan di ruang yang jauh dari jangkauan publik.

Ketika hal ini terjadi berulang, pertanyaan tentang desain konstitusional menjadi relevan.

Pengawasan yang Lemah

Desain konstitusi yang sehat tidak hanya membagi kewenangan, tetapi juga memperkuat pengawasan.

Pengawasan bukan tanda ketidakpercayaan. Ia adalah mekanisme perlindungan terhadap penyalahgunaan.

Jika pengawasan lemah, maka niat baik sekalipun bisa berubah menjadi kebijakan yang

merugikan tanpa koreksi. Jika lembaga pengawas tidak memiliki independensi yang cukup, maka kritik internal menjadi terbatas.

Dalam sistem yang seimbang, kesalahan kebijakan dapat diperbaiki melalui mekanisme hukum dan administrasi pemerintahan yang jelas. Namun ketika pengawasan tidak efektif, rakyat seringkali hanya memiliki satu pilihan yaitu menerima atau menyesuaikan diri.

Di titik inilah hukum mulai terasa tidak melindungi.

Mengapa Hukum Terasa Tidak Hadir

Banyak warga merasakan bahwa hukum tidak selalu bekerja untuk mereka. Perasaan ini tidak selalu lahir dari kasus besar. Ia muncul dari pengalaman sehari-hari.

Proses hukum terasa rumit dan mahal. Akses terhadap keadilan tidak selalu setara. Putusan pengadilan terkadang sulit dipahami oleh masyarakat awam.

Ketika hukum terasa jauh, kepercayaan terhadap sistem menurun.

Namun hukum tidak berdiri sendiri. Ia bekerja dalam kerangka desain konstitusi. Jika desain tersebut tidak memastikan independensi dan akuntabilitas yang kuat, maka hukum mudah dipengaruhi oleh kekuasaan aparatur pemerintahan atau tekanan lainnya.

Dengan kata lain, kegagalan hukum seringkali bukan semata kesalahan aparat, melainkan konsekuensi dari desain kelembagaan yang tidak optimal.

Di sinilah pembaca mungkin mulai merasakan momen kejelasan yaitu masalahnya bukan sekadar pada pelaksana, tetapi pada struktur yang membingkai pelaksanaan.

Relasi Antarlembaga yang Kabur

Konstitusi juga menentukan bagaimana lembaga negara berinteraksi. Jika relasi ini tidak dirancang dengan jelas, maka terjadi tumpang tindih atau kekosongan tanggung jawab.

Dalam beberapa situasi, rakyat kesulitan memahami siapa yang sebenarnya bertanggung jawab atas kebijakan tertentu. Pemerintah pusat menyebut kewenangan daerah. Pemerintah daerah menyebut regulasi pusat. Lembaga legislatif menyalahkan eksekutif, dan sebaliknya.

Ketidakjelasan ini menciptakan ruang abu-abu. Di ruang inilah akuntabilitas melemah.

Desain yang baik harus meminimalkan ruang abu-abu. Ia harus memastikan bahwa setiap kewenangan memiliki batas dan setiap keputusan memiliki pihak yang jelas bertanggung jawab.

Ketika desain tidak tegas, rakyat menjadi pihak yang paling terdampak.

Sentralisasi yang Terselubung

Salah satu gejala desain yang kurang seimbang adalah kecenderungan sentralisasi kuasa, meskipun secara formal struktur tampak terdistribusi.

Sentralisasi tidak selalu berarti semua keputusan diambil oleh satu orang. Ia bisa berarti dominasi satu cabang kekuasaan atas yang lain, atau pengaruh yang tidak proporsional dalam proses legislasi dan pengawasan.

Jika satu lembaga memiliki posisi dominan dalam menentukan agenda dan arah kebijakan, sementara lembaga lain lebih banyak berfungsi sebagai pengesah, maka keseimbangan terganggu.

Dalam jangka panjang, dominasi ini memengaruhi kualitas demokrasi pancasila. Partisipasi rakyat menjadi simbolik, sementara keputusan strategis ditentukan oleh lingkaran yang lebih sempit.

Kembali, ini bukan tuduhan konspiratif. Ini analisis tentang bagaimana desain dapat menciptakan kecenderungan struktural.

Desain yang Tidak Responsif

Konstitusi juga harus dirancang agar responsif terhadap perubahan sosial. Jika terlalu kaku, ia menghambat adaptasi. Jika terlalu lentur tanpa batas, ia membuka ruang manipulasi.

Masalah muncul ketika mekanisme koreksi terhadap kebijakan yang bermasalah tidak berjalan efektif. Proses legislasi yang panjang dan tidak transparan dapat mengurangi partisipasi publik. Mekanisme judicial review yang tidak mudah diakses membuat warga kesulitan menguji kebijakan.

Ketika jalur koreksi terasa jauh, rakyat kembali pada pola lama yaitu menyesuaikan diri.

Di sinilah desain teknis memengaruhi psikologi kehidupan masyarakat. Sistem yang sulit dikoreksi menciptakan budaya pasrah. Sistem yang terbuka terhadap koreksi menciptakan budaya partisipatif.

Mengapa Kita Tidak Melihatnya Sejak Awal?

Pertanyaan yang wajar muncul adalah, mengapa persoalan desain ini tidak terlihat jelas sejak awal?

Jawabannya sederhana yaitu karena desain teknis jarang dibicarakan dalam bahasa yang mudah dipahami. Konstitusi dianggap wilayah ahli hukum tata negara. Rakyat lebih sering diajak memperdebatkan tokoh dan peristiwa, bukan struktur.

Selain itu, perubahan desain tidak selalu menghasilkan dampak instan. Ia bekerja perlahan, melalui akumulasi keputusan dan praktik.

Karena itu, kebocoran yang muncul seringkali dipahami sebagai kegagalan individu, bukan konsekuensi desain.

Bab ini berusaha menggeser cara pandang tersebut.

Momen Kejelasan

Ketika pembaca mulai melihat hubungan antara desain konstitusi dan pengalaman sehari-hari, muncul momen kejelasan seperti ucapan "Oh… pantesan."

Pantesan kebijakan terasa sulit dikoreksi.

Pantesan pengawasan tampak lemah.

Pantesan hukum terasa jauh.

Bukan karena semua orang berniat buruk, tetapi karena desain yang ada tidak cukup kuat untuk menahan penyimpangan dan tidak cukup responsif untuk melindungi rakyat secara efektif.

Kejelasan ini penting. Tanpa kejelasan, kritik mudah tersesat pada individu. Dengan kejelasan, kritik dapat diarahkan pada struktur.

Menuju Perubahan Desain

Bab ini tidak bertujuan menolak konstitusi secara keseluruhan. Ia bertujuan menunjukkan bahwa konstitusi, sebagai desain teknis kekuasaan, dapat dan perlu dievaluasi.

Sebagaimana gambar kerja bangunan bisa direvisi untuk memperkuat struktur, desain konstitusi pun dapat diperbaiki agar lebih setia pada filosofi Pancasila dan lebih efektif melindungi rakyat.

Perbaikan desain bukan bentuk pembangkangan. Ia adalah wujud tanggung jawab kolektif.

Dengan pemahaman bahwa masalah banyak berakar pada desain teknis, pembaca tidak lagi terjebak pada kebingungan atau kemarahan yang tidak terarah. Arah kritik menjadi jelas. Arah perbaikan menjadi konkret.

Dan di sanalah pembahasan kita selanjutnya akan bergerak, menuju bagaimana desain yang lebih seimbang dapat dirumuskan dan diwujudkan.

Karena jika rumah terasa bocor, memeriksa atapnya bukan tindakan radikal. Ia adalah tindakan rasional.

BAB VII
ILUSI STABILITAS DAN KEBOHONGAN SISTEMIK

Setiap negara membutuhkan stabilitas. Tanpa stabilitas, pembangunan sulit berjalan, investasi ragu masuk, dan kehidupan sosial mudah terguncang. Stabilitas adalah fondasi bagi keberlangsungan negara.

Namun stabilitas juga bisa menjadi narasi.

Ketika stabilitas lebih sering diklaim daripada dirasakan, ketika angka-angka lebih meyakinkan daripada pengalaman sehari-hari, di situlah perlu ada jeda untuk berpikir ulang. Bab ini tidak bermaksud menolak pentingnya stabilitas, melainkan menguji apakah stabilitas yang sering disebut benar-benar sejalan dengan realitas yang hidup di masyarakat.

Karena stabilitas yang hanya tampak di atas kertas dapat berubah menjadi ilusi yang menenangkan, tetapi menunda perbaikan yang dibutuhkan.

Negara Mengklaim Baik-Baik Saja

Dalam banyak kesempatan, narasi resmi negara cenderung optimistis. Pertumbuhan ekonomi diumumkan. Angka kemiskinan disebut menurun. Tingkat inflasi terkendali. Peringkat internasional meningkat.

Secara formal, semua itu adalah indikator penting. Negara memang harus diukur melalui data. Kebijakan publik harus berbasis statistik.

Namun ada pertanyaan yang perlu diajukan dengan tenang yakni apakah data tersebut sepenuhnya mencerminkan pengalaman hidup rakyat?

Tidak semua yang terukur terasa. Dan tidak semua yang terasa mudah terukur.

Misalnya, pertumbuhan ekonomi dapat meningkat, tetapi jika sebagian besar peningkatan itu terakumulasi di sektor tertentu atau kelompok tertentu, pengalaman mayoritas warga mungkin tidak berubah signifikan. Tingkat pengangguran bisa menurun secara statistik, tetapi kualitas pekerjaan yang tersedia belum tentu layak.

Narasi "baik-baik saja" seringkali bertumpu pada agregat. Sementara kehidupan sehari-hari rakyat berada pada detail kenyataan.

Di sinilah jarak mulai muncul.

Statistik dan Realitas Hidup

Statistik memiliki kekuatan besar dalam membentuk persepsi. Angka memberikan kesan objektif. Ia tampak netral dan tidak memihak.

Namun angka juga memiliki keterbatasan. Ia menyederhanakan realitas yang kompleks menjadi kategori dan persentase.

Ketika tingkat kemiskinan menurun satu persen, itu berarti ada perubahan dalam kategori tertentu. Tetapi bagi keluarga yang masih bergelut dengan biaya pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar, perubahan satu persen mungkin tidak terasa.

Ketika inflasi dikatakan terkendali, itu berarti harga rata-rata dalam keranjang tertentu stabil. Tetapi

bagi pedagang kecil yang menghadapi kenaikan biaya bahan baku, atau pekerja yang pendapatannya stagnan, stabilitas itu bisa terasa relatif.

Masalahnya bukan pada penggunaan statistik. Masalah muncul ketika statistik digunakan sebagai penutup diskusi, bukan sebagai pembuka evaluasi.

Ketika keluhan rakyat dijawab dengan data agregat, seringkali muncul kesan bahwa pengalaman individu dianggap tidak valid karena tidak sesuai dengan narasi umum.

Di titik ini, stabilitas berubah menjadi pernyataan sepihak.



Gambar 8. Ilustrasi Ilusi Stabilitas dan Kebohongan Sistemik

Narasi "Oknum"

Ketika terjadi skandal atau kegagalan kebijakan, salah satu respons yang sering muncul adalah menyebutnya sebagai ulah "oknum". Istilah ini

memiliki fungsi yang jelas yaitu memisahkan peristiwa dari sistem.

Dengan menyebut oknum, negara dapat mengatakan bahwa masalah bersifat individual dan tidak mencerminkan keseluruhan sistem. Pendekatan ini kadang benar. Tidak semua kesalahan adalah produk desain. Individu memang dapat menyimpang dari aturan.

Namun ketika istilah "oknum" digunakan terlalu sering, ia berisiko menjadi mekanisme perlindungan sistem.

Jika kasus korupsi, penyalahgunaan wewenang, atau kebijakan yang merugikan terus terjadi dalam pola yang serupa, sulit mengatakan bahwa semuanya hanya persoalan individu.

Pola yang berulang menandakan adanya celah struktural. Desain yang memungkinkan penyimpangan terjadi berulang kali perlu diperiksa.

Menggunakan "oknum" sebagai jawaban akhir berarti menghindari pertanyaan tentang desain.

Bab sebelumnya telah membahas bagaimana konstitusi dan pembagian kewenangan membentuk relasi kuasa. Di sini kita melihat bagaimana narasi publik dapat mengaburkan persoalan tersebut.

Krisis yang Dinormalisasi

Ada satu fenomena lain yang patut dicermati yaitu krisis yang perlahan dianggap sebagai kondisi biasa.

Kenaikan harga disebut penyesuaian.

Pengurangan layanan disebut efisiensi.

Pengetatan kebijakan disebut reformasi.

Semua istilah ini memiliki makna yang sah dalam konteks tertentu. Namun jika digunakan terus-menerus tanpa evaluasi mendalam, masyarakat dapat terbiasa dengan kondisi yang seharusnya dianggap tidak ideal.

Normalisasi krisis membuat standar menurun secara perlahan. Apa yang dulu dianggap luar biasa kini dianggap biasa. Apa yang dulu menimbulkan protes kini diterima sebagai bagian dari dinamika.

Proses ini tidak terjadi dalam satu hari. Ia berlangsung melalui pengulangan narasi bahwa semua negara menghadapi tantangan yang sama, bahwa situasi global sulit, bahwa rakyat perlu memahami konteks yang lebih luas.

Memahami konteks memang penting. Tetapi memahami tidak berarti menurunkan standar.

Ketika krisis dijadikan "normal baru", ruang untuk menuntut desain yang lebih baik menyempit.

Stabilitas sebagai Perisai

Stabilitas sering dijadikan alasan untuk menolak kritik struktural. Kritik dianggap berpotensi mengganggu ketenangan. Evaluasi dianggap dapat memicu ketidakpastian.

Namun stabilitas yang sehat bukanlah stabilitas yang menutup ruang koreksi. Justru sebaliknya, sistem yang kuat adalah sistem yang mampu memperbaiki diri tanpa runtuh.

Jika setiap pertanyaan tentang desain dianggap ancaman, maka stabilitas berubah menjadi perisai yang melindungi status quo.

Di sini pembaca diajak berpikir rasional yakni apakah kritik terhadap desain benar-benar mengancam negara, atau justru memperkuatnya?

Sejarah menunjukkan bahwa negara yang mampu bertahan lama adalah negara yang berani mengoreksi strukturnya.

Membedakan Optimisme dan Penyangkalan

Optimisme diperlukan dalam pembangunan. Tanpa optimisme, kebijakan publik kehilangan arah. Namun optimisme berbeda dari penyangkalan.

Optimisme mengakui masalah dan mencari solusi. Penyangkalan mengecilkan masalah dan memperbesar peluang kehancuran.

Jika narasi resmi lebih sering menonjolkan capaian tanpa mengakui kelemahan struktural, masyarakat dapat kehilangan kepercayaan.

Kepercayaan tidak dibangun dengan klaim bahwa semuanya baik-baik saja. Ia dibangun dengan kejujuran tentang apa yang belum baik.

Marah secara emosional terhadap narasi ini tidak banyak membantu. Yang dibutuhkan adalah skeptisisme rasional.

Skeptis bukan berarti menolak semua klaim. Skeptis berarti memeriksa klaim tersebut dengan membandingkannya pada pengalaman nyata dan pola yang berulang.

Mengapa Kita Mudah Percaya

Ada alasan mengapa narasi stabilitas mudah diterima. Ketidakpastian membuat orang cemas. Stabilitas menawarkan rasa aman. Dalam situasi global yang kompleks, masyarakat cenderung mencari kepastian.

Namun rasa aman yang dibangun di atas narasi yang tidak sepenuhnya jujur dapat berumur pendek. Jika kebocoran sistemik terus terjadi, rasa aman itu perlahan memudar. Yang tersisa adalah kebingungan dan apatisme.

Di sinilah pentingnya membedakan antara stabilitas yang sejati dan stabilitas yang dikonstruksi secara naratif.

Stabilitas sejati lahir dari desain yang seimbang dan pengawasan yang efektif. Stabilitas naratif lahir dari pengelolaan persepsi.

Bab ini mengajak pembaca membedakan keduanya.

Titik Balik Cara Pikir

Setelah memahami pola-pola ini, sulit untuk kembali pada cara pikir lama. Sulit untuk menerima begitu saja setiap klaim tanpa membandingkannya dengan realitas yang dirasakan.

Ini bukan ajakan untuk selalu curiga. Ini ajakan untuk selalu memeriksa.

Jika klaim stabilitas sejalan dengan pengalaman rakyat, maka kepercayaan akan tumbuh secara alami.

Jika tidak, maka perlu ada ruang evaluasi yang lebih mendalam.

Momen "tersadar" di sini bukanlah ledakan emosi. Ia adalah perubahan lensa.

Dari menerima narasi secara pasif menjadi menganalisisnya secara aktif.

Menuju Pembahasan Lanjutan

Bab ini membongkar narasi resmi bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk membuka ruang berpikir yang lebih jernih. Stabilitas penting, tetapi stabilitas tidak boleh menjadi alasan untuk menutup mata terhadap desain yang perlu diperbaiki.

Dengan memahami bagaimana narasi bekerja, pembaca diharapkan tidak lagi terjebak pada perdebatan dangkal tentang siapa yang benar atau salah dalam satu kasus.

Fokus bergeser pada pola dan struktur.

Karena jika rumah terus dikatakan kokoh sementara air tetap menetes di banyak sudut, wajar jika penghuni mulai memeriksa atapnya.

Dan pemeriksaan itu tidak dimulai dengan teriakan, melainkan dengan pertanyaan yang tenang namun konsisten.

Di sanalah perjalanan kita berlanjut, menuju pembahasan tentang bagaimana desain dapat diperbaiki agar stabilitas yang diklaim benar-benar dirasakan.

BAB VIII
MENGAPA MENAMBAL TIDAK PERNAH CUKUP

Setelah melihat bagaimana kepedulian bisa salah arah, bagaimana posisi rakyat direduksi, bagaimana konstitusi membentuk desain kekuasaan, dan bagaimana narasi stabilitas bekerja, kita sampai pada satu pertanyaan yang sangat praktis yaitu:

Mengapa semua upaya yang tampak baik itu tidak pernah benar-benar menyelesaikan persoalan?

Mengapa setiap kali satu masalah ditutup, masalah lain muncul?

Mengapa setiap perbaikan terasa seperti jeda, bukan penyelesaian?

Jawabannya tidak sederhana, tetapi pola sebab-akibatnya bisa dilihat dengan cukup jelas.

Kita terlalu sering menambal, dan terlalu jarang memperbaiki desain.

Logika Tambal Sulam

Dalam bangunan fisik, menambal adalah solusi sementara. Ia berguna untuk mencegah kerusakan membesar sebelum perbaikan utama dilakukan. Tetapi jika tambalan dijadikan kebiasaan, bangunan akan dipenuhi lapisan perbaikan kecil yang tidak pernah menyentuh sumber masalah.

Negara bisa bekerja dengan pola yang sama.

Ketika ada kebijakan yang menimbulkan dampak negatif, dibuatlah revisi parsial. Ketika ada

tekanan publik, dikeluarkan kebijakan kompensasi. Ketika muncul ketimpangan, diluncurkan program bantuan.

Semua itu tampak sebagai respons. Dan memang, dalam jangka pendek, ia dapat meredakan gejolak.

Namun jika desain yang melahirkan masalah tidak disentuh, maka masalah akan kembali dalam bentuk yang berbeda.

Kenaikan harga ditutup dengan subsidi sementara.

Kesenjangan ditutup dengan bantuan langsung.

Krisis kepercayaan ditutup dengan kampanye komunikasi.

Tambalan demi tambalan membuat sistem tetap berjalan, tetapi tidak pernah benar-benar sehat.

Siklus Kerusakan yang Berulang

Perbaikan parsial menciptakan siklus yang sulit diputus.

Tahap pertama adalah kebijakan atau desain menimbulkan dampak yang tidak diantisipasi.

Tahap kedua adalah muncul keluhan publik.

Tahap ketiga adalah pemerintah merespons dengan solusi jangka pendek.

Tahap keempat adalah tekanan mereda.

Tahap kelima adalah masalah muncul kembali dalam bentuk baru.

Siklus ini bisa berlangsung bertahun-tahun.

Karena tidak pernah ada keruntuhan total, tidak ada rasa urgensi untuk mengubah desain secara

menyeluruh. Semua pihak belajar hidup dalam siklus tersebut.

Rakyat menjadi adaptif. Pemerintah menjadi reaktif.

Dalam kondisi seperti ini, stabilitas tampak terjaga. Namun stabilitas itu dibangun di atas tambalan yang terus diperbarui.

Beban Psikologis yang Jarang Dibahas

Ada dampak lain yang jarang diperhitungkan dalam siklus tambal sulam ini yaitu beban psikologis rakyat.

Ketika warga negara terus-menerus menghadapi perubahan kebijakan, penyesuaian harga, revisi aturan, dan dinamika yang tidak stabil, muncul kelelahan kolektif.

Kelelahan ini tidak selalu diekspresikan sebagai protes. Ia lebih sering muncul sebagai sikap apatis atau sinis.

Orang mulai berkata, "Memang begini sistemnya."

Mereka berhenti berharap perbaikan besar.

Mereka fokus bertahan, bukan mengubah.

Kelelahan seperti ini masuk akal. Ia adalah respons manusiawi terhadap ketidakpastian yang berulang.

Namun kelelahan yang tidak disadari dapat menjadi penghalang perubahan.

Ketika energi habis untuk menyesuaikan diri, tidak ada ruang tersisa untuk berpikir ulang tentang desain.

Negara yang Bergantung pada Pengorbanan

Dalam kondisi tambal sulam yang berkepanjangan, negara perlahan bergantung pada daya tahan rakyat.

Ketika terjadi kekurangan layanan, rakyat saling membantu.

Ketika terjadi krisis ekonomi, rakyat menahan konsumsi.

Ketika kebijakan belum optimal, rakyat menunggu dan menyesuaikan.

Daya tahan ini sering dipuji sebagai kekuatan bangsa. Memang ada kebenaran di dalamnya. Namun jika daya tahan dijadikan sandaran utama, sistem bisa kehilangan insentif untuk memperbaiki diri.

Negara yang sehat seharusnya mengurangi beban warganya, bukan mengandalkan kemampuan mereka menanggung beban tambahan.

Jika pengorbanan rakyat menjadi mekanisme stabilisasi, maka ada yang perlu dievaluasi pada desainnya.

Kelelahan Sosial sebagai Strategi Tak Tertulis

Tidak ada dokumen resmi yang menyatakan bahwa rakyat harus lelah agar sistem tetap berjalan. Namun dalam praktik, kelelahan sosial dapat berfungsi sebagai strategi tak tertulis.

Ketika warga terlalu sibuk mengurus kehidupan sehari-hari, terlalu lelah menghadapi perubahan, terlalu

fokus bertahan, ruang untuk mengkritisi desain menyempit.

Kelelahan bukan hasil konspirasi, tetapi konsekuensi dari desain yang tidak stabil dan respons yang reaktif.

Dalam situasi ini, energi kolektif terkuras untuk hal-hal mendesak, bukan untuk perubahan mendasar. Yang tersisa adalah siklus yang berulang.

Lelah yang Masuk Akal

Bab ini tidak bermaksud menyalahkan rakyat karena merasa lelah. Justru sebaliknya, ia ingin memvalidasi kelelahan tersebut.

Jika Anda merasa lelah menghadapi dinamika kebijakan yang terus berubah, itu masuk akal. Jika Anda merasa sulit percaya bahwa perubahan kecil akan membawa dampak besar, itu juga masuk akal.

Kelelahan adalah tanda bahwa beban terlalu lama ditanggung tanpa perbaikan mendasar. Namun penting untuk membedakan antara lelah yang sadar dan pasrah.

Lelah yang sadar dapat menjadi titik balik. Ia membuat kita berhenti mempercayai solusi tambalan sebagai jawaban akhir. Ia mendorong kita bertanya tentang apakah ini semua karena desain yang tidak tepat?

Pasrah, sebaliknya, membuat siklus terus berjalan tanpa perlawanan intelektual.

Bab ini mengajak pembaca memilih lelah yang sadar.

Mengapa Solusi Palsu Terasa Nyaman

Solusi tambalan memiliki daya tarik. Ia cepat, konkret, dan memberikan rasa pencapaian. Ketika bantuan disalurkan atau kebijakan direvisi sebagian, ada kesan bahwa masalah telah diatasi.

Namun kenyamanan ini bersifat sementara.

Solusi yang tidak menyentuh desain seringkali hanya memindahkan beban dari satu titik ke titik lain. Masalah yang diselesaikan hari ini muncul kembali dalam bentuk yang berbeda esok hari.

Tanpa menyadari pola ini, masyarakat dapat terjebak dalam ilusi kemajuan.

Meninggalkan solusi palsu membutuhkan keberanian. Ia berarti menerima bahwa perbaikan kecil tidak cukup. Ia berarti siap menghadapi diskusi yang lebih besar tentang struktur.



Gambar 9. Ilustrasi Mengapa Menambal Tidak Pernah Cukup

Siap untuk Perubahan Besar

Perubahan besar seringkali ditakuti karena dianggap berisiko. Namun perubahan desain tidak selalu berarti kekacauan. Ia bisa dilakukan melalui mekanisme konstitusional dan proses yang terukur.

Yang penting adalah kesiapan mental untuk tidak lagi puas dengan tambalan.

Ketika pembaca menyadari bahwa menambal tidak pernah cukup, maka muncul kesiapan untuk memikirkan ulang desain.

Kesiapan ini tidak lahir dari kemarahan yang meledak-ledak. Ia lahir dari kelelahan yang jujur.

Lelah melihat masalah yang sama muncul kembali.

Lelah melihat solusi yang tidak menyentuh akar.

Lelah menjadi penanggung akibat.

Dari kelelahan ini muncul pertanyaan yang lebih dewasa yakni apa yang perlu diubah secara struktural?

Menutup Siklus

Bab ini adalah titik penting dalam perjalanan buku ini. Ia menunjukkan bahwa pola tambal sulam bukan sekadar kebetulan, melainkan konsekuensi desain.

Jika desain tidak diubah, siklus akan berulang. Jika desain ditinjau ulang, ada peluang untuk memutus rantai tersebut.

Menyadari hal ini bukan ajakan untuk pesimisme. Justru sebaliknya, ia membuka ruang harapan yang lebih realistis.

Harapan bukan lagi diletakkan pada tambalan berikutnya, tetapi pada perubahan struktur yang lebih seimbang.

Ketika pembaca sampai di titik ini dan merasa lelah secara sadar, itu bukan tanda kelemahan. Itu tanda kesiapan.

Kesiapan untuk berhenti menjadi korban dari siklus yang berulang.

Kesiapan untuk meninggalkan solusi palsu.

Kesiapan untuk membicarakan perubahan yang lebih besar.

Dan di situlah bab-bab berikutnya akan membawa kita, menuju bagaimana desain yang baru dapat dirumuskan dan diperjuangkan secara rasional dan konstitusional.

Karena rumah yang terus ditambal tanpa pernah diperiksa fondasinya tidak akan pernah benar-benar aman.

Dan penghuni yang sadar akan hal itu tidak lagi cukup puas dengan wadah penampung air.

BAB IX
MEMBENAHI DENAH: JALAN KONSTITUSIONAL

Setelah melalui pembahasan tentang kebocoran sistemik, relasi kuasa yang timpang, jurang antara Pancasila dan praktik, desain teknis konstitusi, hingga siklus tambal sulam yang melelahkan, kita sampai pada pertanyaan yang paling penting yaitu:

Jika masalahnya ada pada desain, bagaimana cara memperbaikinya?

Jawaban atas pertanyaan ini tidak boleh emosional. Ia tidak boleh didorong oleh kekecewaan sesaat. Ia harus rasional, sah, dan terukur.

Perubahan desain negara tidak boleh dilakukan dengan meruntuhkan bangunan. Ia harus dilakukan dengan memperbaiki denahnya secara konstitusional.

Mengapa Perubahan Harus Dimulai dari Desain

Jika kebocoran terus terjadi karena kesalahan struktur, maka memperbaiki perilaku tanpa mengubah struktur tidak akan cukup. Begitu pula dalam negara.

Perubahan kepemimpinan penting. Reformasi birokrasi penting. Penegakan hukum penting. Namun jika desain pembagian kekuasaan dan mekanisme pengawasan tetap sama, pola lama cenderung berulang. Desain adalah akar. Kebijakan adalah cabang.

Mengubah cabang tanpa menyentuh akar hanya menghasilkan variasi, bukan transformasi.

Karena itu, jika ingin memutus siklus yang telah kita bahas, pembenahan harus dimulai dari tingkat konstitusional. Dari gambar teknis negara.

Ini bukan gagasan radikal. Konstitusi sejak awal dirancang untuk dapat diperbaiki melalui mekanisme amandemen. Artinya, para pendiri negara memahami bahwa desain bisa saja perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman.

Amandemen sebagai Mekanisme Sah

Undang-Undang Dasar bukan kitab suci yang tidak boleh disentuh. Ia adalah dokumen hukum tertinggi yang dapat dan memang disediakan ruang untuk diperbaiki.

Amandemen bukan tindakan pemberontakan. Ia adalah mekanisme konstitusional yang sah.



Gambar 10. Ilustrasi Amandemen sebagai Mekanisme Sah

Sejak reformasi 1998, konstitusi Indonesia telah mengalami empat kali amandemen. Perubahan itu membawa banyak pembaruan penting, yaitu penguatan hak asasi manusia, pembentukan lembaga baru, serta perubahan struktur kekuasaan.

Namun waktu berjalan. Tantangan berubah. Praktik pemerintahan berkembang. Dan pengalaman dua dekade terakhir memberi pelajaran baru tentang bagaimana desain bekerja dalam kenyataan.

Pertanyaannya bukan apakah amandemen boleh dilakukan. Pertanyaannya adalah apakah desain yang ada hari ini sudah cukup seimbang dan efektif melindungi rakyat?

Jika jawabannya belum sepenuhnya, maka pembahasan tentang Amandemen Kelima bukan tindakan ekstrem. Ia adalah kelanjutan dari proses konstitusional yang telah berjalan sebelumnya.

Mengembalikan Denah Kedaulatan

Inti dari pembenahan desain adalah mengembalikan logika dasar kedaulatan.

Konstitusi menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Namun dalam praktik, seperti yang telah kita bahas, posisi rakyat seringkali tereduksi menjadi pemilih periodik dan pembayar pajak.

Jika desain konstitusi ingin lebih setia pada prinsip tersebut, maka mekanisme penjelmaan kedaulatan rakyat perlu diperkuat secara struktural.

Di sinilah peran Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjadi relevan.

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, MPR pernah diposisikan sebagai lembaga tertinggi negara yang menjadi penjelmaan kedaulatan rakyat. Dalam perkembangan berikutnya, posisinya berubah menjadi lembaga tinggi negara yang setara dengan yang lain.

Perubahan itu memiliki alasan historis dan politis. Namun pengalaman praktik menunjukkan bahwa hilangnya pusat penjelmaan kedaulatan yang jelas dapat memengaruhi keseimbangan sistem.

Pertanyaan yang layak diajukan adalah, apakah desain saat ini sudah cukup memastikan bahwa rakyat memiliki instrumen kolektif untuk mengoreksi arah negara?

MPR sebagai Penjelmaan Kedaulatan

Mengembalikan MPR sebagai penjelmaan kedaulatan bukan berarti mengulang masa lalu tanpa evaluasi. Ia berarti menata ulang posisi MPR agar menjadi ruang permusyawaratan nasional yang benar-benar mencerminkan kehendak rakyat.

Dalam desain yang diperbarui, MPR dapat difungsikan sebagai forum evaluasi arah negara, penjaga konstitusi secara politik, dan pengimbang dominasi cabang kekuasaan lain.

Fungsi ini harus dirancang dengan mekanisme yang transparan dan akuntabel. Bukan sebagai lembaga superpower yang tak terkontrol, melainkan sebagai simpul kedaulatan yang memastikan bahwa kekuasaan eksekutif dan legislatif tidak berjalan tanpa koreksi strategis.

Dengan posisi seperti itu, rakyat tidak hanya hadir saat pemilu. Mereka hadir secara konstitusional melalui representasi yang memiliki fungsi pengawasan arah negara.

Pemerintah sebagai Pelaksana, Bukan Pemilik Kuasa

Desain yang sehat harus menegaskan bahwa pemerintah adalah pelaksana mandat, bukan pemilik kekuasaan.

Dalam praktik, seringkali terjadi pergeseran persepsi yaitu pemerintah dipandang sebagai pusat kuasa yang menentukan arah tanpa kontrol efektif.

Pembenahan desain harus memperjelas kembali bahwa kekuasaan adalah titipan. Ia memiliki batas waktu, batas kewenangan, dan mekanisme evaluasi.

Pemerintah yang kuat bukanlah pemerintah yang bebas dari pengawasan. Pemerintah yang kuat adalah pemerintah yang bekerja dalam sistem yang jelas batasnya dan memiliki legitimasi yang terus diperbarui melalui mekanisme konstitusional.

Dengan desain seperti itu, stabilitas tidak lagi bergantung pada figur, melainkan pada struktur.

Harapan yang Rasional

Membicarakan perubahan desain seringkali menimbulkan kekhawatiran. Sebagian orang takut bahwa perubahan konstitusi akan membuka ketidakpastian. Kekhawatiran ini wajar.

Namun perubahan yang dilakukan melalui mekanisme sah, dengan perencanaan matang dan partisipasi publik, justru memperkuat legitimasi negara.

Harapan yang ditawarkan di sini bukan utopia. Ia bukan janji bahwa semua masalah akan selesai seketika.

Perubahan desain adalah harapan rasional, kita harus percaya bahwa dengan desain yang lebih seimbang, siklus kebocoran dapat dikurangi. Bahwa dengan mekanisme pengawasan yang diperkuat, kekuasaan tidak lagi menumpuk tanpa kontrol. Bahwa dengan penjelmaan kedaulatan yang lebih jelas, rakyat tidak lagi merasa jauh dari pusat keputusan.

Perubahan desain tidak menjamin kesempurnaan. Namun ia meningkatkan peluang keadilan.

Tidak Meruntuhkan, Tetapi Memperbaiki

Penting untuk menegaskan bahwa pembahasan Amandemen Kelima bukan ajakan untuk meruntuhkan negara. Ia adalah ajakan untuk memperbaiki.

Rumah yang direnovasi bukan rumah yang dihancurkan. Ia adalah rumah yang diperkuat agar lebih layak huni.

Begitu pula dengan negara.

Pembenahan desain adalah bentuk tanggung jawab intelektual. Ia menunjukkan bahwa bangsa ini cukup dewasa untuk mengevaluasi dirinya sendiri.

Tidak ada ancaman dalam proses konstitusional yang sah. Ancaman justru muncul ketika desain tidak pernah dievaluasi sementara praktik terus berubah.

Jalan yang Sah dan Terbuka

Dengan memahami bahwa perubahan dapat ditempuh melalui jalur konstitusional, pembaca tidak lagi terjebak pada dikotomi antara pasrah atau memberontak.

Ada jalan ketiga yaitu memperbaiki melalui mekanisme yang disediakan oleh konstitusi itu sendiri.

Jalan ini membutuhkan diskusi yang matang, kajian yang serius, dan partisipasi yang luas. Ia tidak instan. Tetapi ia sah.

Dan karena ia sah, ia tidak mengancam legitimasi negara. Ia justru memperkuatnya.

Penutup Bab

Setelah melewati perjalanan panjang dari diagnosis hingga analisis, bab ini menawarkan arah.
Jika desain adalah akar masalah, maka desain pula yang harus dibenahi. Jika konstitusi adalah gambar teknis kekuasaan, maka amandemen adalah alat perbaikannya.

Dengan pendekatan ini, pembaca dapat melihat bahwa solusi bukan berada pada pergantian figur semata, tetapi pada pembenahan struktur.
Harapan tidak lagi bergantung pada siapa yang berkuasa, tetapi pada bagaimana kekuasaan itu dirancang.

Dan ketika desain lebih seimbang, rakyat tidak perlu lagi menjadi penambal kebocoran. Mereka kembali pada posisinya sebagai pemilik rumah.

Di titik inilah perjalanan buku ini mendekati puncaknya yaitu bukan hanya dengan seruan revolusi, tetapi dengan kepercayaan diri rasional bahwa perubahan besar dapat ditempuh melalui jalan yang sah.

Karena bangsa yang matang tidak meruntuhkan rumahnya, namun senantiasa memperbaikinya.

SEKOLAH
SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

BAB X
DARI RAKYAT BAIK KE RAKYAT BERDAULAT

Sepanjang buku ini, kita telah berjalan melalui berbagai lapisan yaitu dari kebocoran sistemik, kepedulian yang salah arah, reduksi posisi rakyat, jurang antara Pancasila dan praktik, desain teknis konstitusi, hingga jalan konstitusional untuk memperbaikinya.

Kini kita tiba pada pertanyaan terakhir yang paling pribadi yaitu:

Kita ingin menjadi rakyat seperti apa?

Pertanyaan ini tidak sederhana. Ia menyentuh identitas dan martabat. Ia menyentuh cara kita memandang diri sendiri dalam hubungan dengan negara.

Rakyat Baik

Menjadi rakyat baik adalah sesuatu yang selama ini diajarkan sebagai kebajikan. Rakyat baik membayar pajak tepat waktu. Rakyat baik mematuhi aturan. Rakyat baik menjaga ketertiban dan tidak membuat keributan.

Semua itu penting. Tanpa kepatuhan dasar, negara tidak bisa berjalan. Tanpa ketertiban, kehidupan bersama sulit terjaga.

Namun menjadi rakyat baik seringkali dipersempit hanya pada kepatuhan.

Rakyat baik yang dimaksud dalam praktik sehari-hari adalah rakyat yang tidak banyak bertanya. Rakyat yang menerima kebijakan meski terasa berat. Rakyat yang sabar menghadapi perubahan yang tidak selalu dijelaskan secara transparan.

Dalam pola seperti ini, kebaikan identik dengan kepasifan.

Padahal kebaikan yang terlalu lama berdiri sendiri dapat menjelma menjadi pembiaran.

Rakyat Berdaulat

Berbeda dengan rakyat baik, rakyat berdaulat memahami posisinya dalam struktur negara.

Rakyat berdaulat tahu bahwa ia adalah sumber legitimasi. Rakyat tidak hanya memiliki kewajiban, tetapi juga hak untuk mengevaluasi desain negara.

Rakyat berdaulat tetap membayar pajak dan mematuhi hukum. Namun ia tidak berhenti di sana. Ia berpikir tentang bagaimana hukum dibuat. Ia mempertanyakan bagaimana kekuasaan dibagi. Ia terlibat dalam diskusi tentang arah negara.

Perbedaan antara rakyat baik dan rakyat berdaulat bukan pada moralitas, melainkan pada kesadaran posisi.

Rakyat baik ingin negara berjalan lancar.

Rakyat berdaulat ingin negara berjalan benar.

Rakyat baik membantu ketika ada kebocoran.

Rakyat berdaulat bertanya mengapa atapnya bocor.

Keduanya tidak saling bertentangan. Namun tanpa kesadaran berdaulat, kebaikan mudah diserap oleh sistem yang tidak diperbaiki.

Keberanian Berpikir Struktural

Berpikir struktural tidak selalu populer. Ia tidak menawarkan solusi instan. Ia membutuhkan kesabaran dan ketelitian.

Namun berpikir struktural adalah tanda kedewasaan dalam bernegara dan berpolitik.

Alih-alih terpaku pada figur atau peristiwa, rakyat berdaulat melihat pola. Ia memahami bahwa desain memengaruhi perilaku. Ia tidak berhenti pada keluhan, tetapi mengarahkannya pada pembahasan sistem.

Keberanian berpikir struktural bukan berarti selalu setuju dengan perubahan tertentu. Ia berarti bersedia membuka ruang diskusi tentang desain negara.

Dalam konteks pembahasan sebelumnya, berpikir struktural berarti melihat amandemen konstitusi sebagai opsi sah, bukan ancaman.

Keberanian berpikir struktural juga berarti memahami bahwa memperbaiki desain adalah bagian dari menjaga negara, bukan merusaknya.

Peran Intelektual dan Masyarakat Sipil

Perubahan desain tidak terjadi dalam ruang hampa. Ia membutuhkan kontribusi dari berbagai pihak.

Kaum intelektual memiliki tanggung jawab untuk menjelaskan persoalan struktural dengan bahasa yang dapat dipahami publik. Mereka bukan sekadar pengamat, tetapi penafsir realitas.

Masyarakat sipil berperan sebagai pengingat bahwa negara tidak berdiri di atas dirinya sendiri. Organisasi sosial, komunitas, dan kelompok profesional dapat menjadi jembatan antara rakyat dan pembuat kebijakan.

Generasi muda memiliki posisi yang unik. Mereka hidup di era keterbukaan informasi dan memiliki akses luas terhadap gagasan global. Namun akses informasi saja tidak cukup. Diperlukan kemampuan memilah, menganalisis, dan menghubungkan persoalan sehari-hari dengan desain yang lebih besar.

Semua peran ini tidak memerlukan heroisme berlebihan. Namun membutuhkan konsistensi dan integritas.

Meninggalkan Kepedulian Semu

Kepedulian semu adalah kepedulian yang berhenti pada permukaan. Ia cepat, emosional, dan reaktif. Ia penting dalam situasi darurat, tetapi tidak cukup untuk perubahan jangka panjang.

Rakyat berdaulat tidak meninggalkan kepedulian, namun harus memperdalamnya.

Ia tetap membantu ketika ada korban. Namun ia tidak berhenti di sana. Ia memastikan bahwa korban yang sama tidak terus muncul karena desain yang salah.

Meninggalkan kepedulian semu berarti menolak puas dengan solusi tambalan. Ia berarti mengalihkan energi dari sekadar merespons ke arah merancang ulang sistem.

Ini bukan pekerjaan sehari atau sebulan. Ia adalah proses yang memerlukan diskusi panjang dan partisipasi luas.

Berdiri Sejajar dengan Negara

Tujuan dari seluruh pembahasan ini bukan untuk melawan negara. Pembahasan ini adalah untuk berdiri sejajar dengan negara.

Negara bukan entitas yang terpisah dari rakyat. Negara adalah sistem yang dibangun oleh dan untuk rakyat.

Berdiri sejajar berarti menyadari bahwa kedaulatan bukan slogan, melainkan posisi nyata. Posisi ini tidak diwujudkan melalui kemarahan, tetapi melalui kesadaran dan partisipasi konstitusional.

Rakyat berdaulat tidak merusak rumahnya sendiri. Ia memperbaikinya melalui jalur yang sah.

Rakyat berdaulat tidak membenci negara. Ia menuntut agar negara setia pada desain yang adil.

Martabat sebagai Penutup

Martabat tidak selalu ditunjukkan dengan suara keras. Ia sering hadir dalam ketenangan.

Rakyat yang berdaulat tidak perlu berteriak untuk didengar. Ia berbicara melalui argumen yang

rasional, melalui partisipasi yang konsisten, dan melalui keberanian mempertanyakan desain.

Buku ini tidak meminta pembaca untuk marah. Namun mengajak pembaca untuk berpikir dan mengambil posisi.

Jika setelah membaca seluruh pembahasan ini Anda merasa tidak lagi nyaman dengan cara pikir lama, itu adalah tanda bahwa proses refleksi sedang bekerja.

Menjadi rakyat baik adalah langkah awal. Menjadi rakyat berdaulat adalah kelanjutannya.

Dan peralihan itu tidak memerlukan revolusi liar. Ia memerlukan kesadaran bahwa negara adalah milik bersama, dan desainnya dapat diperbaiki melalui mekanisme yang sah.



Gambar 11. Ilustrasi Dari Rakyat Baik ke Rakyat Berdaulat

Penutup Akhir

Bangunan bernama Indonesia tidak dibangun untuk menekan rakyatnya. Ia dibangun untuk melindungi dan menyejahterakan.

Jika dalam praktiknya muncul kebocoran dan ketimpangan, maka tanggung jawab kita bukan sekadar mengeluh atau menambal, melainkan memastikan bahwa desainnya kembali selaras dengan filosofi yang kita sepakati bersama.

Dari rakyat baik ke rakyat berdaulat bukanlah perjalanan yang dramatis. Ia adalah pergeseran kesadaran.

Dan kesadaran itulah yang menjadi fondasi paling kokoh bagi masa depan negara.

Bukan kemarahan.

Bukan kekacauan.

Melainkan keberanian yang tenang untuk berkata:

Kita tidak sedang melawan negara.
Kita sedang mengingatkan bahwa negara ini milik kita.

EPILOG
BERANI MENGUBAH GAMBAR BANGUNAN

Setelah seluruh pembahasan tentang kebocoran sistemik, relasi kuasa yang timpang, jurang antara nilai dan praktik, hingga pentingnya pembenahan desain konstitusional, kita sampai pada satu titik yang sederhana namun menentukan yaitu keberanian.

Bukan keberanian untuk marah.

Bukan keberanian untuk meruntuhkan.

Melainkan keberanian untuk memperbaiki.

Sepanjang buku ini kita telah menggunakan metafora bangunan. Metafora itu bukan sekadar gaya bahasa. Ia membantu kita melihat negara sebagai sesuatu yang dirancang, bukan sesuatu yang terjadi begitu saja.

Dan di sinilah kesadaran pertama perlu ditegaskan kembali yaitu negara bukan takdir.

Negara Bukan Takdir

Tidak ada negara yang lahir sempurna dan tidak bisa diperbaiki. Negara adalah hasil kesepakatan sosial dan desain institusional yang dibuat oleh manusia.

Jika negara dirancang oleh manusia, maka ia bisa ditinjau ulang oleh manusia.

Seringkali muncul anggapan bahwa kondisi negara adalah sesuatu yang harus diterima apa adanya. Bahwa sistem yang ada sudah final. Bahwa tidak ada ruang untuk perubahan mendasar.

Anggapan seperti ini membuat kita pasif. Ia membuat kita melihat persoalan sebagai nasib, bukan sebagai hasil desain.

Padahal sejarah bangsa ini sendiri menunjukkan bahwa perubahan adalah bagian dari perjalanan. Konstitusi pernah diamandemen. Struktur kekuasaan pernah diubah. Mekanisme pemerintahan pernah diperbaiki.

Artinya, negara bukan sesuatu yang beku. Ia hidup dan berkembang.

Jika hari ini kita merasakan adanya ketimpangan, kebocoran, atau jarak antara nilai dan praktik, maka respons yang rasional bukanlah menerima sebagai takdir, melainkan mengevaluasi desainnya.

Menerima bahwa negara bukan takdir berarti menerima tanggung jawab sebagai pemilik kedaulatan.



Gambar 12. Ilustrasi Membangun Ulang Denah Harapan

Konstitusi Bukan Kitab Suci

Konstitusi adalah dokumen hukum tertinggi. Ia menjadi rujukan bagi seluruh peraturan di bawahnya. Ia memiliki posisi terhormat dalam sistem ketatanegaraan.

Namun menghormati konstitusi tidak berarti menganggapnya tidak dapat disentuh.

Konstitusi disusun dalam konteks sejarah tertentu, dengan pertimbangan tertentu, dan berdasarkan pengalaman pada masanya. Seiring waktu, konteks berubah. Tantangan baru muncul. Praktik pemerintahan berkembang.

Jika desain konstitusi tidak lagi sepenuhnya mampu menjawab tantangan zaman, maka evaluasi bukanlah bentuk penghinaan. Ia adalah bentuk tanggung jawab.

Menyebut konstitusi sebagai sesuatu yang tidak boleh diubah sama sekali justru berisiko mengerdilkan fungsinya. Konstitusi bukan simbol sakral yang hanya boleh dibaca, tetapi instrumen yang harus bekerja.

Instrumen yang tidak pernah dievaluasi akan tertinggal oleh realitas.

Karena itu, berbicara tentang Amandemen Kelima bukanlah tindakan ekstrem. Ia adalah kelanjutan logis dari proses konstitusional yang memang dirancang untuk memungkinkan perbaikan.

Yang perlu dijaga bukan teks semata, tetapi semangat dan tujuan yang melatarbelakanginya.

Kedaulatan Bukan Slogan

Kedaulatan rakyat sering disebut dalam pidato dan dokumen resmi. Ia menjadi frasa yang akrab di telinga.

Namun kedaulatan bukan sekadar kata. Ia adalah posisi.

Jika rakyat hanya hadir saat pemilu, tetapi tidak memiliki instrumen efektif untuk mengoreksi desain negara, maka kedaulatan itu belum sepenuhnya terwujud.

Kedaulatan berarti rakyat memiliki ruang untuk menentukan arah, bukan sekadar menyesuaikan diri dengan keputusan yang telah diambil.

Ia berarti rakyat memiliki mekanisme untuk mengoreksi kekuasaan secara sah dan terstruktur.

Sepanjang buku ini kita telah melihat bagaimana posisi rakyat dapat tereduksi menjadi penanggung akibat dan penambal kebocoran. Mengembalikan kedaulatan berarti mengembalikan posisi tersebut ke tempat yang semestinya.

Bukan untuk melawan negara, tetapi untuk mengendalikannya secara konstitusional.

Keberanian Memperbaiki Desain

Perubahan desain selalu menimbulkan pertanyaan. Sebagian orang khawatir bahwa membahas amandemen akan membuka ketidakpastian. Kekhawatiran itu wajar.

Namun ketidakpastian yang paling berbahaya justru terjadi ketika desain tidak pernah dievaluasi sementara praktik terus berubah.

Keberanian yang dibutuhkan bukan keberanian untuk bertindak gegabah. Ia adalah keberanian intelektual untuk mengakui bahwa sistem dapat diperbaiki.

Keberanian untuk berkata bahwa tambalan tidak lagi cukup.

Keberanian untuk melihat akar persoalan tanpa menyalahkan individu semata.

Keberanian untuk menggunakan jalur konstitusional sebagai sarana perbaikan.

Masa depan negara tidak ditentukan oleh seberapa sering kita merespons krisis dengan solusi jangka pendek. Ia ditentukan oleh seberapa serius kita menata ulang struktur agar krisis tidak berulang.

Bangunan yang kokoh tidak hanya bergantung pada kekuatan materialnya, tetapi pada ketepatan desainnya.

Begitu pula negara.

Menutup dengan Kesadaran

Buku ini tidak menawarkan utopia. Ia tidak menjanjikan bahwa perubahan desain akan menghilangkan semua masalah. Tidak ada sistem yang sepenuhnya tanpa celah.

Namun sistem yang dirancang dengan keseimbangan dan pengawasan yang kuat memiliki kemampuan memperbaiki dirinya sendiri.

Di titik ini, pilihan ada pada kita sebagai warga negara.

Apakah kita akan terus menyesuaikan diri dengan kebocoran yang berulang? Ataukah kita akan menggunakan hak konstitusional untuk memperbaiki denahnya?

Berani mengubah gambar bangunan bukan berarti membenci rumah kita. Justru sebaliknya, ia menunjukkan bahwa kita ingin rumah itu lebih layak dihuni.

Negara ini dibangun dengan cita-cita yang besar. Filosofinya jelas. Tujuannya mulia. Jika praktiknya belum sepenuhnya mencerminkan nilai tersebut, maka tanggung jawab kita bukan menjauh, melainkan mendekat dengan kesadaran yang lebih matang.

Negara bukan takdir.

Konstitusi bukan kitab suci.

Kedaulatan bukan slogan.

Dan masa depan bangsa ini tidak ditentukan oleh kebiasaan menambal, melainkan oleh keberanian memperbaiki desain.

Keberanian itu tidak harus lantang. Ia cukup rasional, konsisten, dan sah.

Karena bangsa yang dewasa tidak meruntuhkan rumahnya sendiri.

Bangsa yang dewasa harus mampu memperbaikinya dengan tenang dan bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2012). *Mengapa negara gagal: Awal mula kekuasaan, kemakmuran, dan kemiskinan* (Terjemahan). PT Elex Media Komputindo.

Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

Latif, Y. (2011). *Negara paripurna: Historisitas, rasionalitas, dan aktualitas Pancasila*. PT Gramedia Pustaka Utama.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. (2002). *Risalah sidang perubahan (Amandemen) Undang-Undang Dasar 1945 tahun 1999-2002*. Sekretariat Jenderal MPR RI.

Nadjib, E. A. (1993). *Markesot bertutur*. Mizan.

Nadjib, E. A. (1995). *Titik nadir demokrasi*. Zaitun.

Rousseau, J.-J. (2007). *Perjanjian sosial (Du contrat social)* (Terjemahan). Visimedia.

Saputra, Prayogi R., & Setiyawan, Rinto. (2025). Rancangan Amandemen Kelima UUD 1945. [E-book]. Diakses dari https://ebook.sekolahnegarawan.id/

Sekolah Negarawan X Institute. (2025). Empat Pilar Mandataris Rakyat: Rekonstruksi Struktur MPR Berbasis Filosofi Sedulur Papat Lima Pancer. [E-book]. Diakses dari https://ebook.sekolahnegarawan.id/

Sekretariat Jenderal MPR RI. (2002). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Sekretariat Jenderal MPR RI.

Setiyawan, Rinto. (2025). Rakyat Kembali Berdaulat: Penataan Ulang Arsitektur Konstitusi. [E-book]. Diakses dari https://ebook.sekolahnegarawan.id/

Setiyawan, Rinto., & Saputra, Prayogi R. (2025). Naskah Akademik Rancangan Amandemen Kelima UUD 1945: Rakyat Kembali Berdaulat. Malang: Sekolah Negarawan X Institute.

Winters, J. A. (2011). *Oligarki* (Terjemahan). PT Gramedia Pustaka Utama.